



PROFIL PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022



Bappeda Kabupaten Bengkulu
2022

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur diucapkan Kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Walaupun dengan tampilan yang sederhana, masih dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sebagai bentuk isian ruang informasi dan menambah perbendaharaan literatur bagi kajian-kajian yang dibutuhkan serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin memotret Kabupaten Bengkalis dalam perspektif yang lebih luas.

Kami juga berharap masukan dan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan buku "Profil Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022" yang telah disusun agar substansi serta data dapat lebih sempurna kedepannya.

Semoga dengan apa yang telah disajikan ini dapat memberikan nuansa kebhathinan bagi kita semua dalam menyatukan gerak dan Langkah demi menuju cita-cita "***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera***".

Bengkalis, September 2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

RINTO, SE. M.Si
Pembina
NIP. 19810601 200903 1 002

SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS



Assalamu'alaikum wr wb

Keberadaan media informasi bagi suatu daerah khususnya bagi Kabupaten Bengkalis sangatlah penting untuk mengenalkan daerah kita kepada masyarakat luas sehingga informasi yang didapatkan dapat menarik berbagai pihak untuk mengkaji lebih dalam dan berinvestasi serta bersinergi membangun negeri ini kearah yang lebih baik. Saya mengapresiasi tersusunnya buku “Profil Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022” dengan harapan dapat menyediakan beragam data dan informasi yang kita butuhkan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat Kabupaten Bengkalis kepada Negeri ini serta menjadi pengikat semangat membangun ke masa depan yang lebih baik.

Saya memandang dari perspektif pemangku kebijakan melalui buku “Profil Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022” ini dapat memberikan pengetahuan yang luas akan besarnya potensi kewilayahan dan sumber daya daerah sebagai salah satu rujukan bagi perbaikan dan perumusan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026.

Semoga Allah SWT senangtiasa meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mencapai visi **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**

Billahitaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Bengkalis, September 2022

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP

ARTI LAMBANG KABUPATEN BENGKALIS



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 16 tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu, yaitu :

Bentuk Dan Pembagian Lambang

Lambang Daerah berbentuk Perisai yang terdiri dari lima bagian, yaitu :

1. Rotan yang melingkar seluruh Lambang dengan jumlah ruas 17;
2. Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima;
3. Pohon Rumbia dengan 4 pelepah, dan
4. Pohon Para dengan 4 helai daun, sehingga berjumlah 8;
5. Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45.

Warna Utama yang dipakai adalah Hijau Muda disamping menggunakan warna kuning, putih, biru tua dan hitam, Pemberian warna lambang, yaitu :

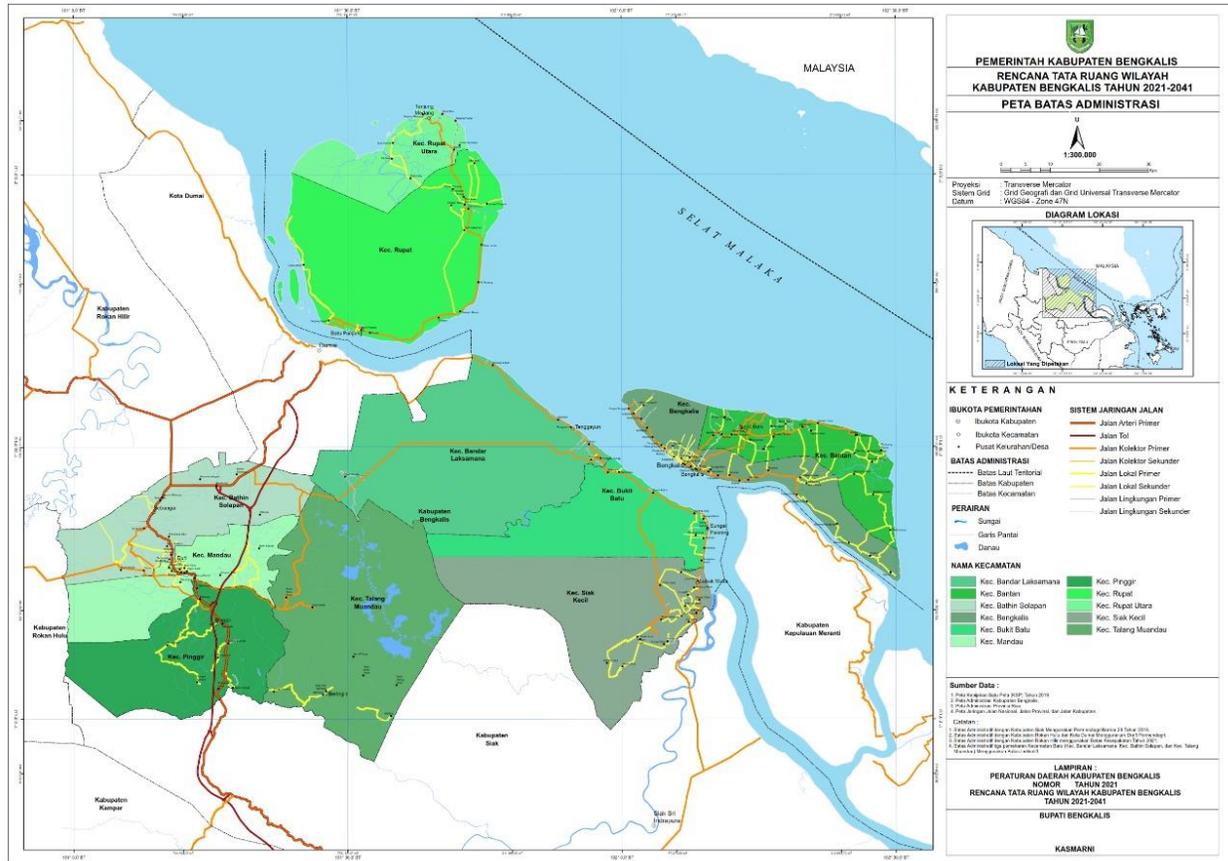
1. Rotan yang melingkari seluruh Lambang adalah warna kuning;
2. Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima adalah warna putih;
3. Pohon rumbia dengan 4 pelepah, dan

4. Pohon Para dengan 4 helai daun, adalah warna biru tua;
5. Ikan Terubuk adalah warna kuning.

Arti Lambang

1. Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas mengingatkan tanggal Proklamasi, dan melambangkan Persatuan dan Kesatuan Penduduk Daerah;
2. Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama perhubungan dan pengambilan hasil laut, berarti lambing wilayah perairan yang terdiri dari pada laut dan sungai, serta gelombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pohon Rumbia dan Pohon Para masing-masing terdiri dari 4 pelepah dan 4 helai daun sehingga berjumlah 8, mengingatkan pada bulan Proklamasi, dan melambangkan kesuburan tanah sebagai penghasil pangan yang potensial, berarti lambang ketahanan pangan dimasa sulit, dan melambangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk hubungan perdagangan ke luar Daerah;
4. Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45, mengingatkan tahun Proklamasi, dan melambangkan wilayah perairan penghasil ikan berarti lambang hasil laut yang potensial.

PETA KABUPATEN BENGKALIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS.....	i
SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS.....	ii
ARTI LAMBANG KABUPATEN BENGKALIS.....	iii
PETA KABUPATEN BENGKALIS	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
2.1 SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKALIS.....	4
2.2 POTENSI GEOGRAFIS KABUPATEN BENGKALIS.....	4
2.3 TOPOGRAFI	7
2.4 HIDROLOGI.....	8
2.5 PENGGUNAAN LAHAN.....	9
2.6 DEMOGRAFI.....	11
2.7 PENGEMBANGAN WILAYAH	13
BAB III PEMERINTAHAN DAERAH	14
3.1. VISI	14
3.2 MISI.....	15
3.3 PROGRAM UNGGULAN	15
3.4. APARATUR DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH.....	20
3.4.1. Forkompimda	20
3.4.2. Kelembagaan Daerah	21
3.5. KEPEGAWAIAN	24
3.6 KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.....	26

3.6.1	Kerjasama Antar Daerah.....	26
3.6.2	Kerjasama dengan Pihak Ketiga.....	26
3.6.3	Kerjasama Daerah dengan Intansi Vertikal Daerah.....	30
BAB IV	PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO.....	33
4.1	TINJAUAN PERTUMBUHAN EKONOMI	33
4.2	PERKEMBANGAN PDRB.....	34
4.3	STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH BERDASARKAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTUMBUHAN PDRB	36
4.4	PDRB PERKAPITA	39
4.5	PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	40
4.5.1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	41
4.5.2	Pertambangan dan Penggalian	42
4.5.3	Industri Pengolahan.....	43
4.5.4	Pengadaan Listrik dan Gas.....	44
4.5.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45
4.5.6	Konstruksi.....	46
4.5.7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor....	47
4.5.8	Transportasi dan Pergudangan	49
4.5.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50
4.5.10	Informasi dan Komunikasi.....	50
4.5.11	Jasa Keuangan Dan Asuransi.....	51
4.5.12	Real Estate.....	52
4.5.13	Jasa Perusahaan	53
4.5.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib....	54
4.5.15	Jasa Pendidikan	55
4.5.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	56
4.5.17	Jasa Lainnya.....	57
4.7	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	58
4.8	ANGKA KEMISKINAN	59
BAB V	PELUANG INVESTASI KABUPATEN BENGKALIS.....	63
5.1	KLASTER PEMBANGUNAN KAWASAN KABUPATEN BENGKALIS.....	63
5.2	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021	65

5.3	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH DAERAH TRI WULAN 1 DAN 2 TAHUN 2021	73
5.2	PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKALIS.....	77
5.2.1	Umum.....	77
5.2.2	Kondisi Eksisting	77
5.3	PENGEMBANGAN KECAMATAN BENGKALIS DAN BANTAN SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN PERIKANAN	82
5.3.1	Umum.....	82
5.3.2	Kondisi Existing.....	82
5.3.3	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu	83
5.4	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BENGKALIS.....	83
5.4.1	Umum.....	83
5.4.2	Kondisi Existing.....	84
5.5.3	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu	86
5.5	PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK DI KABUPATEN BENGKALIS	86
5.5.1	Umum.....	86
5.5.2	Kondisi Existing.....	86
5.5.3	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu	86
5.6	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN BENGKALIS.....	87
5.6.1	Umum.....	87
5.6.2	Kondisi Existing.....	87
5.6.3	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu	87
5.7	PENGEMBANGAN INDUSTRI NENAS DI KABUPATEN BENGKALIS	88
5.7.1	Umum.....	88
5.7.2	Kondisi Existing.....	88
5.7.3	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu	88
5.8	PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET DI KABUPATEN BENGKALIS.....	89
5.8.1	Umum.....	89
5.8.2	Kondisi Existing.....	89
5.8.3	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu	89
5.9	PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BENGKALIS.....	90

5.9.1 Umum.....	90
5.9.2 Kondisi Existing.....	90
5.9.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu.....	90
5.10 PENGEMBANGAN BUDIDAYA UDANG VANNAMEI DI KABUPATEN BENGKALIS.....	91
5.10.1 Umum	91
5.10.2 Kondisi Existing.....	91
5.10.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu.....	91
5.11 PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LELE DI KABUPATEN BENGKALIS	91
5.11.1 Umum	91
5.11.2 Kondisi Eksisting.....	92
5.11.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu.....	92
BAB VI PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkulu tahun 2022	5
Tabel 2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu, 2022.....	7
Tabel 3. Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkulu	9
Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2021	11
Tabel 5. Program Unggulan Daerah Kabupaten Bengkulu 2022-2026.....	16
Tabel 6. Nama Pejabat Forkompimda Kabupaten Bengkulu Tahun 2022.....	20
Tabel 7. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bengkulu Tahun 2021.....	23
Tabel 8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2021	24
Tabel 9. Jumlah Pegawai Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu Tahun 2021.....	25
Tabel 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	25
Tabel 11. Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan Pihak Ketiga Tahun 2022	29
Tabel 12. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Dengan Instansi Vertikal Daerah Tahun 2022.....	30
Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	40
Tabel 14. Kontribusi, Laju Pertumbuhan, dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	41
Tabel 15. Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	42
Tabel 16. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, dan Laju Implisit Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	44
Tabel 17. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	45
Tabel 18. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	46
Tabel 19. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Konstruksi Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	47
Tabel 20. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	48
Tabel 21. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	49

Tabel 22. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	50
Tabel 23. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	51
Tabel 24. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	52
Tabel 25. Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Real Estate Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	52
Tabel 26. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	53
Tabel 27. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Bengkulu, 2016-2020	54
Tabel 28. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	55
Tabel 29. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	56
Tabel 30. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Lainnya Kabupaten Bengkulu, 2016-2020.....	57
Tabel 31. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkulu tahun 2017 – 2021	60
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	65
Tabel 33. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Unggulan Pemerintah Daerah Tri Wulan 1 Dan 2 Tahun 2021.....	74
Tabel 34. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu, 2018.....	84
Tabel 35. Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Bengkulu, 2014-2018.....	84
Tabel 36. Banyaknya Air Minum yang Disalurkan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Bengkulu, 2014-2018 (m3)	85
Tabel 37. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Bengkulu, 2014-2017	86
Tabel 38. Luas Areal Produksi Tanaman Karet per Kecamatan.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administratif Kabupaten Bengkalis.....	5
Gambar 2.	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis	9
Gambar 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2017-2021:	33
Gambar 4.	Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2022	35
Gambar 5.	Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan 2021.....	36
Gambar 6.	Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan 2021.....	37
Gambar 7.	Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2017-2021	38
Gambar 8.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020	58
Gambar 9.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2017 – 2021.....	60
Gambar 10.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2017 – 202.....	62
Gambar 11.	Klaster Pembangunan Kawasan Kabupaten Bengkalis	63
Gambar 12.	Cagar biosfer Giam	78
Gambar 13.	Mangrove Tanjung Leban.....	78
Gambar 14.	Pantai Sepahat	79
Gambar 15.	Pantai Wisata Bahari	79
Gambar 16.	Wisata Tanah Gambut Arboretum.....	79
Gambar 17.	Pantai Tanjung Lapin	80
Gambar 18.	Pulau Beting Aceh.....	80
Gambar 19.	Pantai Tanjung Punak.....	80
Gambar 20.	Pantai Perapat Tunggal	81
Gambar 21.	Pantai Indah Selat Baru	81
Gambar 22.	Pantai Ketapang.....	81
Gambar 23.	Kampung Zapin	82



BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah merupakan hal yang penting sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus nyata dan bertanggung jawab, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam upaya menggali sumber-sumber pembiayaan sendiri, maka diperlukan langkah-langkah yang komprehensif untuk merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan.

Untuk itu, maka dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang dapat mengelola potensi dan sumber daya daerah, perlu disusun Profil Pembangunan Daerah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang dalam rangka pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan. Sehingga hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia daerah dan pengembangan manajemen pengelolaan data informasi di daerah dapat terlaksana dengan baik. Disamping itu, profil pembangunan daerah ini berguna untuk memberikan hasil yang optimal terhadap kemampuan daerah dalam mengembangkan wilayahnya dengan menentukan arah perkembangan dan inventarisasi sumber daya yang tersedia.

Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 ini sebagai wujud nyata serta upaya untuk memetakan kondisi potensi dan sumber daya daerah, sehingga dapat dengan mudah untuk dikenali adanya peluang pengembangan daerah dan potensi daerah yang dimiliki. Profil Pembangunan Daerah ini juga memberikan gambaran umum tentang adanya kondisi fisik, karakteristik sosio-demografis, kondisi sosial politik dan sosial budaya, perekonomian daerah, sarana dan prasarana (infrastruktur).

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Profil Kabupaten Bengkalis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabuapten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Profil Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum tentang Visi dan Misi serta program strategis pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 – 2026;
2. Memberikan informasi tentang keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkulu pada tahun sebelumnya;
3. Menyajikan sejumlah data sektoral seperti : sarana dan prasarana, sosial budaya dan perekonomian.

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya Profil Kabupaten Bengkulu tahun 2022 ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu media promosi daerah yang dapat membantu investor mencari gambaran terkait dengan Kabupaten Bengkulu;
2. Sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji pembangunan di Kabupaten Bengkulu;
3. Sebagai data pembandingan bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan berbagai arah kebijakan strategis daerah.



BAB II GAMBARAN UMUM



2.1 SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKALIS

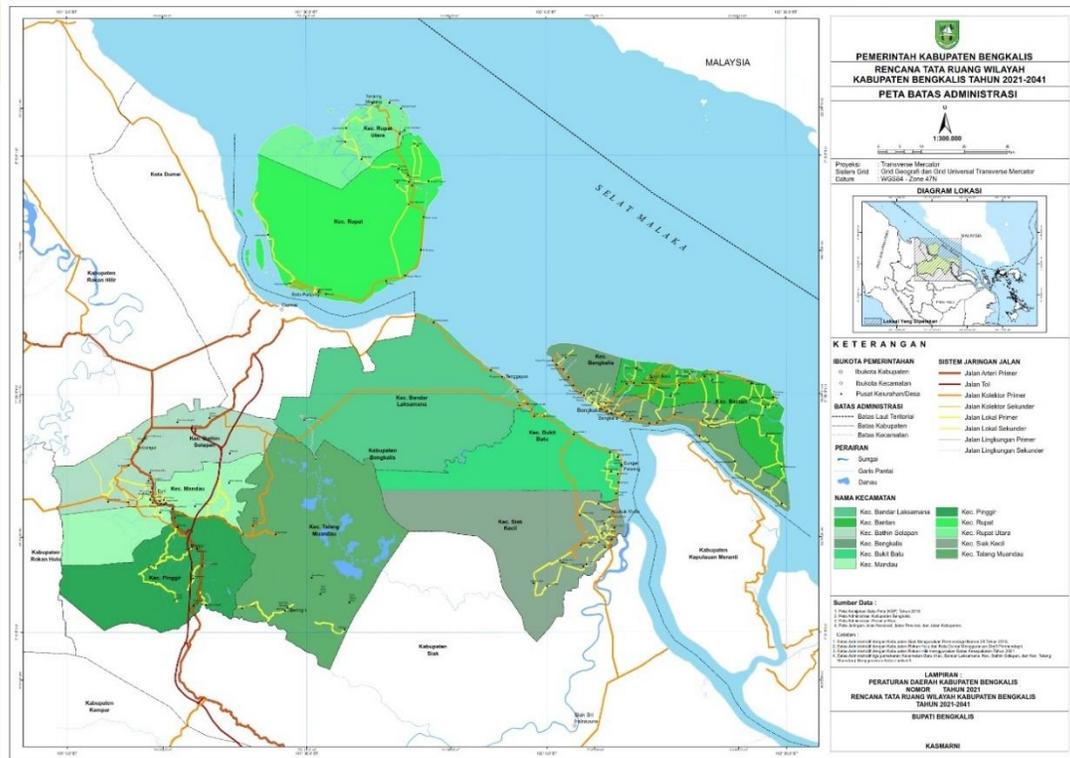
Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis yang dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, pada saat itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, maka sejumlah daerah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis mulai dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ditahun berikutnya terbit Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis dan pemekaran terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 terbentuklah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan penggabungan beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

2.2 POTENSI GEOGRAFIS KABUPATEN BENGKALIS

Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.426,48 Km², terdiri dari 3 pulau utama yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Terdapat 11 kecamatan , 19 kelurahan dan 136 desa. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 8.426,48 Km². Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan, dimana 4 (empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 53% dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Talang Muandau dengan luas wiayah 1.244,47 Km² (14,77%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah 1.237,70 Km² (14,60%), Kecamatan Rukat dengan luas wilayah 1.136,31 Km² (13,48%) dan Kecamatan Bathin Solapan dengan luas wilayah 855,62 Km² (10,15%). Sedangkan luas wilayah 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas yang lebih kecil, dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Mandau (4,42%) dan Kecamatan Rukat Utara (4,49%).

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Bengkalis



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2022

No.	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	462,24	5,49
2.	Bantan	Selat Baru	-	23	442,93	5,26
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	526,62	6,25
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1.237,70	14,69
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	957,95	11,37
6.	Mandau	Air Jamban	9	2	372,25	4,42
7.	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	855,62	10,15
8.	Pinggir	Pinggir	2	8	811,46	9,63

No.	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah
9.	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.244,71	14,77
10.	Rupat	Batu Panjang	4	12	1.136,31	13,48
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	378,68	4,49
Kabupaten Bengkulu			19	136	8.426,48	100,00

Sumber : Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2022)

Secara geografis, letak Kabupaten Bengkulu sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan sebagian lainnya berada pada jalur ekonomi penting di Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Letak wilayah tersebut berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkulu pada masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkulu memiliki potensi dan daya tarik bagi investasi pada bidang pertanian dan perikanan, dan industri pariwisata. Posisi geostrategis dan ketersediaan sumberdaya lahan dan panjang garis pantai Pulau Rupat merupakan potensi sumberdaya alam daerah yang masih dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari sebagai penggerak ekonomi daerah dimasa mendatang.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkulu terletak pada posisi 100°57'57,6" - 102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkulu terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkulu yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkulu yang terdiri dari Kecamatan Bengkulu dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya 938 Km² atau 93.840 Hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya 1.514,99 Km² atau 151.499 Hektar. Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkulu terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairan 2.722,27 Km² atau 272.227 Hektar. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkulu dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti).

Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratan 3.284,04 Km² atau 328.404 Ha.

2.3 TOPOGRAFI

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3 - 8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha.

Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl.

Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert. Selain berhadapat langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi. Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut.

Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2022

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten
1.	Mandau	55	103
2.	Pinggir	45	100

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten
3.	Bathin Solapan	55	106
4.	Talang Muandau	45	90
5.	Bukit Batu	6	15
6.	Siak Kecil	6	25
7.	Bandar Laksamana	6	24
8.	Rupat	5	71
9.	Rupat Utara	5	86
10.	Bengkalis	5	-
11.	Bantan	5	15

Sumber : *Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)*

2.4 HIDROLOGI

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupat, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembang Luar.

Di antara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang \pm 90 Km. Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa di antaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi.

Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupat. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupat dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis.

NO.	PERUNTUKAN RUANG	KODE KAWASAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
4.	<i>Kawasan Perlindungan Setempat</i>	<i>PS</i>	1.135	0,13
5.	<i>Suaka Margasatwa</i>	<i>SM</i>	77.001	8,94
6.	<i>Kawasan Ekosistem Mangrove</i>	<i>EM</i>	9	0,00
B.	<i>Kawasan Budi Daya</i>		773.501	89,81
1.	<i>Kawasan Hutan Produksi Terbatas</i>	<i>HPT</i>	109.874	12,76
2.	<i>Kawasan Hutan Produksi Tetap</i>	<i>HP</i>	342.327	39,75
3.	<i>Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi</i>	<i>HPK</i>	68.034	7,90
4.	<i>Kawasan Tanaman Pangan</i>	<i>P-1</i>	2.040	0,24
5.	<i>Kawasan Perkebunan</i>	<i>P-3</i>	164.312	19,08
6.	<i>Kawasan Perikanan Budi Daya</i>	<i>IK-2</i>	2.246	0,26
7.	<i>Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi</i>	<i>MG</i>	8.442	0,98
8.	<i>Kawasan Peruntukan Industri</i>	<i>KPI</i>	2.904	0,34
9.	<i>Kawasan Pariwisata</i>	<i>W</i>	6.723	0,78
10.	<i>Kawasan Permukiman Perkotaan</i>	<i>PK</i>	24.977	2,90
11.	<i>Kawasan Permukiman Perdesaan</i>	<i>PD</i>	41.601	4,83
12.	<i>Kawasan Transportasi</i>	<i>TR</i>	20	0,002
LUAS TOTAL			861.256	100

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

Secara umum penggunaan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi dalam dua kategori yaitu Kawasan Lindung dengan proporsi luasan 29,1% dan Kawasan Budidaya dengan proporsi 70,9% terhadap total luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Penggunaan lahan untuk hutan produksi mencapai 29,92% dari kawasan produksi dan 14,53% untuk

penggunaan perkebunan besar swasta. Penggunaan lahan untuk pertanian basah dan kering hanya sekitar 6% dan penggunaan lahan untuk perkebunan rakyat hanya sekitar 9,58%.

Hal ini berimplikasi bahwa penggunaan sumberdaya lahan untuk pengembangan perekonomian masyarakat skala kecil semakin terbatas yang disebabkan oleh akses sumberdaya lahan yang semakin terbatas. Konsekuensi pengembangan pertanian dan perkebunan berbasis masyarakat membutuhkan inovasi teknologi yang dapat mengembangkan kegiatan produksi pertanian dan perkebunan secara intensifikasi.

2.6 DEMOGRAFI

a) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 mencapai 68 jiwa per Km². Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau.

Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penambahan jumlah penduduk akibat perkembangan kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Peresentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²)
1.	Mandau	372,25	26,72%	412
2.	Pinggir	811,46	10,93%	77
3.	Bathin Solapan	855,62	16,31%	109
4.	Talang Muandau	1.244,71	4,25%	20
5.	Bukit Batu	526,62	3,87%	42
6.	Siak Kecil	957,95	4,33%	26
7.	Bandar Laksamana	1.237,70	2,84%	13
8.	Rupat	1.136,31	6,14%	31

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Peresentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²)
9.	Rupat Utara	378,68	2,48%	38
10.	Bengkalis	462,24	14,71%	182
11.	Bantan	442,93	7,43%	96
Kabupaten Bengkalis		8.426,48	100,00%	68

Sumber : *Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)*

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau 412 Jiwa/Km² yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, atau sebesar 26,72% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebanyak 14.249 Jiwa atau 2,48% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis.

Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

b) Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk setiap tahun di Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk sebesar 1,88% per tahun. Letak wilayah Kabupaten Bengkalis pada jalur lintas Sumatera dan pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis yang terbuka bagi daerah lain menjadi salah satu penyebab pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertumbuhan dari faktor kelahiran relatif kecil.

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru.

Sedangkan dampak negatif penambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.7 PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 - 2042.

1) Pengembangan wilayah strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

2) Pengembangan wilayah strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

3) Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupat)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (mangrove).



BAB III PEMERINTAHAN DAERAH



3.1. VISI

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”

dengan penjelasan sebagai berikut:

- 4) Bermarwah, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
- 5) Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- 6) Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

3.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Misi 3 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

3.3 PROGRAM UNGGULAN

Dalam pencapaian Visi dan Misi daerah, kepala daerah telah mengajukan beberapa kebijakan yang relatif spesifik pada kebijakan ataupun rencana program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut dipertimbangkan akan memberikan pengaruh besar secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan disinkronisasi kedalam bentuk formal rumusan arah kebijakan atau program maupun kedalam kegiatan pembangunan lima tahun ke depan.

Terdapat 8 kebijakan khusus dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kemudian dijabar melalui 18 nomenklatur program. Delapan kebijakan khusus tersebut adalah Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurahan, Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera, Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi, Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat, Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau, Menjadikan Wisma Daerah Sebagai Rumah Aspirasi dan terakhir Stimulus Ekonomi bagi Pekerja Sektor Informal seperti buruh, petani, peternak, nelayan dan lain-lain, Peningkatan.

Untuk merealisasikan delapan kebijakan khusus ini, diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp. 379.351.217.806,00 pada tahun 2022. Target penggunaan anggaran ini diprediksi akan meningkat hingga Rp. 390.018.778.696,30 pada tahun 2023. Kebutuhan

anggaran untuk delapan kebijakan khusus ini akan terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp. 401.219.717.631,12, lalu pada tahun 2025 diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp. 412.980.703.512,67 dan terakhir pada tahun 2026 perkiraan penggunaan anggaran akan meningkat menjadi Rp. 425.329.738.688,30.

Penggunaan anggaran yang sangat besar untuk delapan kebijakan khusus ini diharapkan dapat direalisasikan dengan baik demi mencapai sasaran yang diinginkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Lebih rinci tentang Program Unggulan Daerah Kabupaten Bengkalis diuraikan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Program Unggulan Daerah Kabupaten Bengkalis 2022-2026

NO	Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	OPD Penanggung Jawab
1.	Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurah)	(Belanja Transfer)	(Bantuan Keuangan)	BPKAD
		Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	OPD Penanggung Jawab
2	Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
4	Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

NO	Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	OPD Penanggung Jawab
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
5	Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
6	Menjadikan Wisma Daerah Sebagai Rumah Aspirasi	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
7	Pelayanan Sistem Kependudukan Berbasis Mobile	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Stimulus Ekonomi bagi Pekerja Sektor Informal seperti buruh petani peternak nelayan dan lain-lain Peningkatan Lapangan Pekerjaan dan Penerapan	Urusan Pemerintah Bidang Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	OPD Penanggung Jawab
	Teknologi serta Inovasi Bidang Perekonomian	Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan

NO	Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	OPD Penanggung Jawab
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.4. APARATUR DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

3.4.1. Forkompimda

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis didukung oleh instansi vertikal yang tergabung ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Bengkalis, daftar nama anggota Forkompimda dimaksud dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Nama Pejabat Forkompimda Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KASMARNI, S.Sos., MMP	Bupati Bengkalis
2.	AKBP INDRA WIJATMIKO. S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Bengkalis
3.	RAHMAT BUDIMAN TAUFANI SH. M.Kn	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis
4.	BAYU SOHO RAHARDJO, S.H	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
5.	RAHMATULLAH RAMADAN D, S.H.I	Kepala Pengadilan Agama Bengkalis
6.	Letkol Inf ENDIK YUNIA. H	Dandim 0303 Bengkalis

3.4.2. Kelembagaan Daerah

Untuk dapat melaksanakan pemerintahan yang lancar maka diperlukan sistem tata kerja perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 1 Sekretariat Daerah yang didukung oleh 3 Asisten, 3 Staf Ahli Bupati dan 12 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 24 Dinas, 7 Badan, 2 RSUD dan 11 Kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun kedudukan dan tugas pokok perangkat administrasi pemerintahan tersebut, antara lain:

a. Sekretariat Daerah

Merupakan unsur pembantu pimpinan daerah, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.

Sekretariat Daerah dibantu oleh 3 Asisten, 3 Staf Ahli Bupati dan 12 Bagian yaitu :

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , terdiri atas :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c) Bagian Hukum;
 - d) Bagian Kerjasama.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Bagian Perekonomian;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d) Bagian Sumber Daya Alam.
- 3) Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Organisasi;
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sekretariat DPRD Kabupaten

Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kabupaten.

c. Dinas Daerah Kabupaten

Merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Organisasi Dinas Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan;
- 5) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 18) Dinas Perikanan;
- 19) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
- 20) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 21) Dinas Perkebunan;
- 22) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 23) Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Lembaga Teknis Daerah (Kantor/Badan)

Merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Kabupaten dalam lingkup tugasnya. Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- 1) Inspektorat Daerah;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Badan Pendapatan Daerah;
- 5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 6) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

f. Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, seorang Kepala Desa/Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 136.

Dalam hal membantu seorang Kepala Daerah berdasarkan sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat, yang landasan teoritik dan konseptualnya didiskresikan dari peraturan yang lebih tinggi (UUD dan Undang-undang) maka Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah di Indonesia yang membentuk Tenaga Ahli Bupati dengan tujuan membantu tugas-tugas khusus dari Kepala Daerah guna pengendalian dan percepatan program strategis pembangunan daerah. Adapun tenaga ahli bupati dimaksud terdiri dari :

1. Tenaga Ahli Bupati Bidang Perencanaan dan Anggaran
2. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pembangunan
3. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pengawasan

Pada Tabel 7 berikut dapat dilihat jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis yaitu :

Tabel 7. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	462,24	3	28
2	Bantan	Selat Baru	442,93	-	23
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	526,62	1	9
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	1.237,70	-	7
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	957,95	-	17
6	Mandau	Air Jamban	372,25	9	2

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
7	Bathin Solapan	Sebangar	855,62	-	13
8	Pinggir	Pinggir	811,46	2	8
9	Talang Muandau	Beringin	1.244,71	-	9
10	Rupat	Batu Panjang	1.136,31	4	12
11	Rupat Utara	Tanjung Medang	378,68	-	8
Total Keseluruhan			8.426,48	19	136

Sumber BPS: Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2022)

3.5. KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu hingga akhir Desember 2021 sebanyak 6.752 orang di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	24
2.	II	1.516
3.	III	4.052
4.	IV	1.160
Jumlah Total		6.752

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai yang banyak adalah golongan III dengan jumlah 4.052 orang atau sebesar 60,01% dari jumlah pegawai 6.752 orang. Sementara untuk golongan II dan IV masing-masing sebesar 22,45% dan 17,18 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Sedangkan jumlah pegawai per kecamatan berdasarkan jenis kelamin, dan jenjang pendidikan dapat dilihat masing-masing pada tabel III-5 dan III-6 berikut ini:

Tabel 9. Jumlah Pegawai Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No.	Kecamatan	Tahun 2021		
		L	P	J
1.	Bengkalis	1.466	1.481	2.947
2.	Bantan	186	247	433
3.	Bukit Batu	75	193	268
4.	Mandau	157	883	1.040
5.	Rupat	155	249	404
6.	Rupat Utara	72	67	139
7.	Siak Kecil	108	198	306
8.	Pinggir	91	303	394
9.	Bandar Laksamana	51	99	150
10.	Talang Muandau	49	119	168
11.	Bathin Solapan	75	428	503
Jumlah Total PNS		2.485	4.267	6.752

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2021

Keterangan : L = Laki-laki, P = Perempuan, dan J = Jumlah

Tabel 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	12
2	SLTP	24
3	SLTA	1.433
4	D.I	27
5	D.II	243
6	D.III	742

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
7	D.IV	82
8	S.1	3.846
9	S.2	339
10	S.3	4
Jumlah		6.752

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2021

3.6 KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Dalam mencapai tujuan dan target pembangunan yang didukung oleh pihak-pihak terkait dilakukan melalui Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama baik yang masih berlaku di tahun 2022 ini atau dilakukan pada tahun 2022 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

3.6.1 Kerjasama Antar Daerah

1. Kesepakatan Bersama Nomor 415.4/SETDA-KS/KB/2022/05 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Se-Provinsi Riau (Pemprov Riau dengan Pemkab, Kuansing, Pemkab Inhu, Pemkab Pelalawan, Pemkab Siak, Pemkab Kampar, Pemkab Rohul, Pemkab, Rohil, Pemkab Bengkalis , Pemkab Meranti, Pemkab Pekanbaru, Pemko Dumai) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
2. Perjanjian Kerjasama Replikasi Sistem Aplikasi Pengumpulan Data Kinerja (SIAPADIA) yang dikembangkan menjadi Aplikasi Sistem Informasi Capaian Kinerja (SICAKEB) antara Biro Ortal Setda Prov. Riau dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PKS/SETDA-KS/I/2022 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.
3. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kec Bengkalis dan Dumai antara Sekretariat Daerah Pemkab.Bengkalis dan Sekretariat Daerah Dumai Pemko. Dumai berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 13/PKS/SETDA-KS/IX/2022 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

3.6.2 Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah

otonom serta untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi fakir miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran dan pegawai negeri sipil beserta keluarganya Pemerintah Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Dumai berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Dumai tentang Kepersetaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Capaian kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Bengkalis, telah mencapai 77,57%. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, atau sebanyak 473.320 jiwa, dari 610.087 jiwa jumlah total penduduk Kabupaten Bengkalis.

2. Pelaksanaan Sinergitas Penyediaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bengkalis antara Kanwil Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berlaku selama 5 tahun berdasarkan Nota Kesepakatan 002/NK/SETDA-KS/III/2022.

3. Forum *Community Social Responsibility* (CSR)

Sehubungan dengan telah disahkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 471/KPTS/VII/2021, tentang pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bengkalis yang dijadikan wahana untuk menyelaraskan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan pelaksanaan program dan kewajiban perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Bengkalis, maka keselarasan tuntutan yang normatif dari seluruh pemangku kepentingan yang diimplementasikan oleh berbagai pihak dan tingkatan, mulai dari kantor pusat korporasi multinasional, interpretasi kebijakan perusahaan di Indonesia, kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun tuntutan berbagai organisasi masyarakat sipil yang mengawasi kiprah perusahaan dapat terlaksana.

Adapun Konsep CSR bertujuan sebagai suatu wahana untuk mewujudkan sinergitas pembangunan. Sampai saat ini terdapat 29 Perusahaan yang bergabung menjadi Forum Koordinasi Implementasi Program CSR Kabupaten Bengkalis yang telah melaksanakan tanggung jawab social perusahaan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1) PT. Pertamina;
- 2) PT. Darmali Jaya Lestari;
- 3) PT. Bank Riau Kepri;
- 4) PT. Pipas Mas Putih;
- 5) PT. Satria Perkasa Agung;
- 6) PT. Arara Abadi;

- 7) PT. Sigma Energi Indonesia;
- 8) PT. Swadaya Abdi Manunggal;
- 9) PT. Sumatera Riang Lestari;
- 10) PT. Besmindo Andalas Semesta;
- 11) PT. Intan Sejati Andalan;
- 12) PT. Marita Makmur Jaya;
- 13) PT. Swadaya Abdi Manunggal;
- 14) PT. Matra Unika Tama;
- 15) PT. Unichemcandi Indonesia;
- 16) PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- 17) PT. Bank Mega, TBK;
- 18) PT. Bank Syariah Mandiri;
- 19) PT. Sekato Pratama Makmur;
- 20) PT. Satria Perkasa Agung;
- 21) PT. Bank Negara Indonesia;
- 22) PT. Murini Sam sam;
- 23) PT. Transgasindo;
- 24) PT. Epsindao Jaya Pratama;
- 25) PT. Adei Plantation dan Industri;
- 26) PT. Meskom Agro Sarimas;
- 27) PT. Radiant Utama Interinsco TBK;
- 28) PT. Supraco Indonesia;
- 29) PT. Mesitechmitra Purnabangun.

Sementara itu, program kerjasama yang dilaksanakan oleh Forum CSR meliputi beberapa bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Pembangunan Infrastruktur Dasar;
- d. Bidang Olahraga
- e. Bidang Sosial dan Keagamaan;
- f. Bidang Perekonomian Rakyat;
- g. Bidang Lingkungan dan;
- h. Bidang Lainnya yang disertai oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Selain kerjasama yang telah dijelaskan diatas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lainnya baik yang masih berlaku di tahun 2022 atau yang dilakukan pada tahun 2022 tersaji pada tabel 11 berikut :

Tabel 11. Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan Pihak Ketiga Tahun 2022

No.	NOMOR KESEPATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJA SAMA/NOTA KESEPAKATAN	INSTANSI/BADAN/ LEMBAGA/ YAYASAN	KETERANGAN (MASA BERLAKU)
1.	001/KB/SETDA-KS/I/2022	Yayasan Bhakti Tanoto dan Pemkab.Bengkalis	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Bengkulu (3 Tahun)
2.	415.4/SETDA-KS/KB/2022/02	Stikes Al Insyirah Pekanbaru dan Pemkab.Bengkalis	Tri Dharma Perguruan Tinggi (5 Tahun)
3.	415.4/SETDA-KS/KB/2022/03	Universitas Lancang Kuning dan Pemkab.Bengkalis	Tri Dharma Perguruan Tinggi (5 Tahun)
4.	415.4/SETDA-KS/KB/2022/04	Universitas Pahlawan dan Pemkab. Bengkulu	Tri Dharma Perguruan Tinggi (5 Tahun)
5.	002/PKS/SETDA-KS/I/2022	Yayasan Bhakti Tanoto dengan Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu	Pelaksanaan Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) (1 Tahun)
6.	002.I/PKS/SETDA-KS/II/2022	RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, Fakultas Kedokteran UNRI Pekanbaru, RSUD Bengkulu	Rumah Sakit Pendidikan Dokter (5 Tahun)
7.	10/PKS/SETDA-KS/VIII/2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkulu dan Pusat Studi Industri dan Perkotaan Universitas Riau	Kerjasama Penyusunan Rumusan Naskah RUPM dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana UMUM Penanaman Modal (1 Tahun)

Sumber: Bagian Kerjasama Daerah Setda Kabupaten Bengkulu, Tahun 2022

3.6.3 Kerjasama Daerah dengan Instansi Vertikal Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi antara Bupati dengan pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah didampingi forum pimpinan daerah/Muspida yang ada di Kabupaten Bengkulu, diantaranya Kantor BPN, Kantor BPS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bengkulu, Polres Bengkulu, Dandim 0303 Bengkulu, Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kantor Imigrasi Bengkulu, Dan Lanal Dumai dan Kantor Bea dan Cukai Tipe B Kabupaten Bengkulu. Rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin atau insidental terutama dalam menginventarisir dan menyikapi permasalahan bersifat khusus yang memerlukan koordinasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan yang lebih besar.

Adapun kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu baik dengan Instansi Vertikal yang masih berlaku di tahun 2022 atau yang dilakukan pada tahun 2022 tersaji pada tabel 8 berikut:

Tabel 12. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Dengan Instansi Vertikal Daerah Tahun 2022

No.	NOMOR KESEPATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJA SAMA/NOTA KESEPAKATAN	INSTANSI/BADAN/ LEMBAGA/ YAYASAN	KETERANGAN (MASA BERLAKU)
1.	001/NK/SETDA-KS/I/2022	Kementerian Pendidikan dan Teknologi dan Pemerintah Kab. Bengkulu	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak (5 Tahun)
2.	003/NK/SETDA-KS/V/2022	Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Sinergitas terhadap Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Hukum dan Produk Hukum (5 Tahun)
3.	004/NK/SETDA-KS/VI/2022	Kementerian Agama Kab.Bengkalis dengan Pemkab. Bengkulu	Sinergitas dalam Penyediaan Tenaga Ahli, Peningkatan dan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi, Hukum, Produk Hukum dan Pelayanan Publik (5 Tahun)
4.	005/NK/SETDA-KS/VI/2022	Kanwil Kemenkum Ham Riau dan Pemkab Bengkulu	Sinergitas Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi

No.	NOMOR KESEPATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJA SAMA/NOTA KESEPAKATAN	INSTANSI/BADAN/ LEMBAGA/ YAYASAN	KETERANGAN (MASA BERLAKU)
			Manusia di Kabupaten Bengkalis (5 Tahun)
5.	006/NK/SETDA-KS/VI/2022	Badan Pusat Statistik Kab.Bengkalis dan Pemkab. Bengkalis	Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan data dan/atau informasi statistik menuju satu Data (5 Tahun)
6.	007/NK/SETDA-KS/VI/2022	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemkab. Bengkalis	Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kab.Bengkalis (3 Tahun)
7.	008/NK/SETDA-KS/VIII/2022	Perwakilan Kementerian Keuangan Prov. Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pengelola Keuangan Daerah dan Penguatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (5 Tahun)
8.	009/NK/SETDA-KS/VIII/2022	Badan Riset dan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemkab. Bengkalis	Pembangunan Sumber daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta Pembangunan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (3 Tahun)
9.	002.2/PKS/SETDA-KS/III/2022	Dinas Dukcapil Kab. Bengkalis, Pengadilan Agama Bengkalis, Kementerian Agama Kab. Bengkalis	Akselerasi Pelayanan Antar terintegrasi Perubahan Dokumen Kependudukan Scan terpadu dan responsif di Kab. Bengkalis (3 Tahun)
10.	003.I/PKS/SETDA-KS/IV/2022	Bulog Bengkalis dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bengkalis	Pengadaan dan Pendistribusian Paket Kebutuhan Pokok Mar Bersubsidi untuk Rumah

No.	NOMOR KESEPATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJA SAMA/NOTA KESEPAKATAN	INSTANSI/BADAN/ LEMBAGA/ YAYASAN	KETERANGAN (MASA BERLAKU)
			Tangga tepat sasaran di Kab. Bengkulu (1 Tahun)
11.	005/PKS/SETDA-KS/IV/2022	Dinas DUKCAPIL Kab. Bengkulu dengan Kantor Kementerian Agama	Layanan Publik Melalui Inovasi Koordinasi Pencatatan Perkawinan Terintegrasi (SIPINTER) (5 Tahun)
12.	006/PKS/SETDA-KS/VI/2022	Dinas DUKCAPIL Kab. Bengkulu dengan Kantor Kementerian Agama	Pelayanan Isbat Nikah Pencatatan Perkawinan Penerbitan Akte Nikah dan Penerbitan Dokumen Kependudukan terpadu di Kab. Bengkulu (1 Tahun)
13.	007/PKS/SETDA-KS/VII/2022	Balitbang Kab. Bengkulu dengan KANWIL KUM HAM	Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Kab. Bengkulu (5 Tahun)
14.	009/PKS/SETDA-KS/VI/2022	Dinas PU Kab. Bengkulu dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu	Pemberian Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya dibidang Perdata dan Tata Usaha
15.	11/PKS/SETDA-KS/VIII/2022	Kantor Pertanahan dan Badan Pendapatan Daerah Kab.Bengkalis	Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah
16.	12/PKS/SETDA-KS/VIII/2022	Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Optimalisasi Pungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkulu

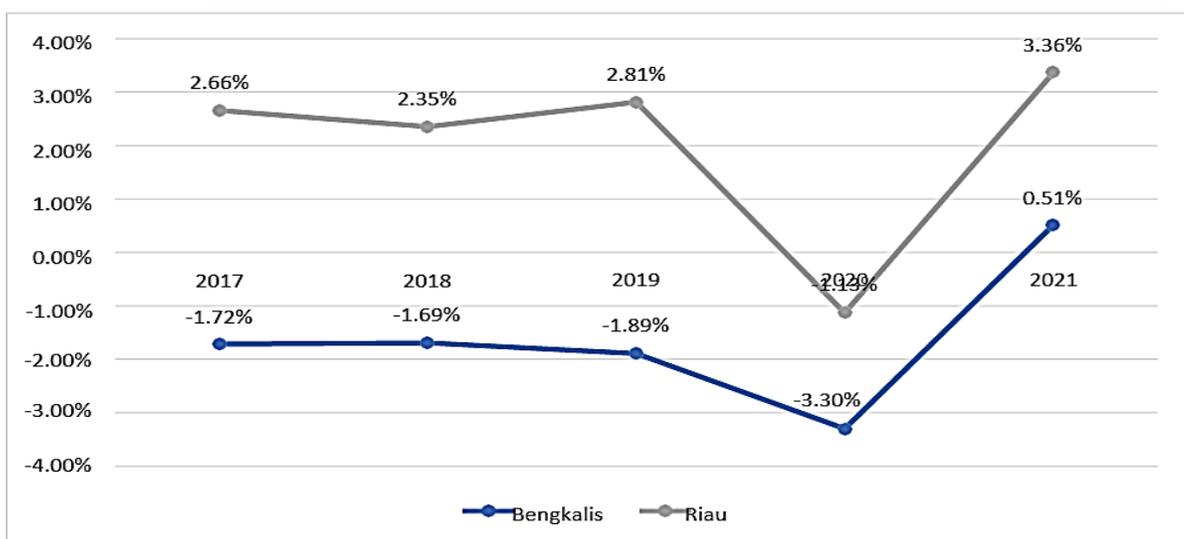
Sumber: Bagian Kerjasama Daerah Setda Kabupaten Bengkulu, Tahun 2022

BAB IV PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

4.1 TINJAUAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi pada setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Secara total PDRB berdasarkan harga konstant tahun 2010, perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami perbaikan pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama periode 2017-2021. Pertumbuhan positif sebesar 0,51% berhasil ditorehkan seiring membaiknya perekonomian dunia dan nasional selama pandemi Covid19, meski demikian secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Bengkalis masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dalam lima tahun terakhir seperti yang ditampilkan pada gambar 3 berikut.

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2017-2021:



Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama periode 2017-2021 terlihat mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan Kabupaten Bengkalis berdasarkan harga konstan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan negatif, atau mengalami kontraksi kecuali pada tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan positif. Hal ini disebabkan karena perkembangan nilai produksi sektor pertambangan mengalami kontraksi selama periode 2017-2020 dan ditambah dengan menurunnya produksi pada sektor yang lainnya, sehingga mempengaruhi akumulasi nilai PDRB Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2021 walaupun sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan namun sektor lainnya terutama industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif yang cukup besar 5,10%.

Untuk sektor lainnya diluar pertambangan dan industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan positif sepanjang periode 2016-2019, khususnya pada tahun 2020. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai tahun 2020 menyebabkan beberapa sektor yang hubungannya erat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khususnya non esensial menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun sektor dimaksud antara lain: Sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Lainnya. Penurunan nilai output beberapa sektor perekonomian tersebut terakumulasi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

4.2 PERKEMBANGAN PDRB

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, begitu pula dengan perkembangan nilai PDRB pada harga konstant. Kecenderungan penurunan nilai PDRB harga berlaku dan harga konstant ditenggarai karena terjadinya penurunan produksi minyak dan jatuhnya harga minyak mentah dunia. Selain itu pandemi COVID-19 semakin memperparah produksi output daerah Kabupaten Bengkalis yang terus menurun. Namun terakhir pada tahun 2021 kondisi PDRB Kabupaten Bengkalis sudah mengalami banyak perbaikan dan meningkat cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti yang di tampilkan pada gambar 5 berikut ini.

Gambar 4. Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkulu tahun 2017-2022



Sumber : Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2022)

Berdasarkan gambar diatas Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp. 132,978 Triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 148,60 Triliun namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 140,378 Triliun. Selanjutnya pada tahun 2020 secara signifikan menurun menjadi Rp. 114,583 triliun, terakhir pada tahun 2021 PDRB ADHB mengalami peningkatan menjadi Rp. 139,613 triliun.

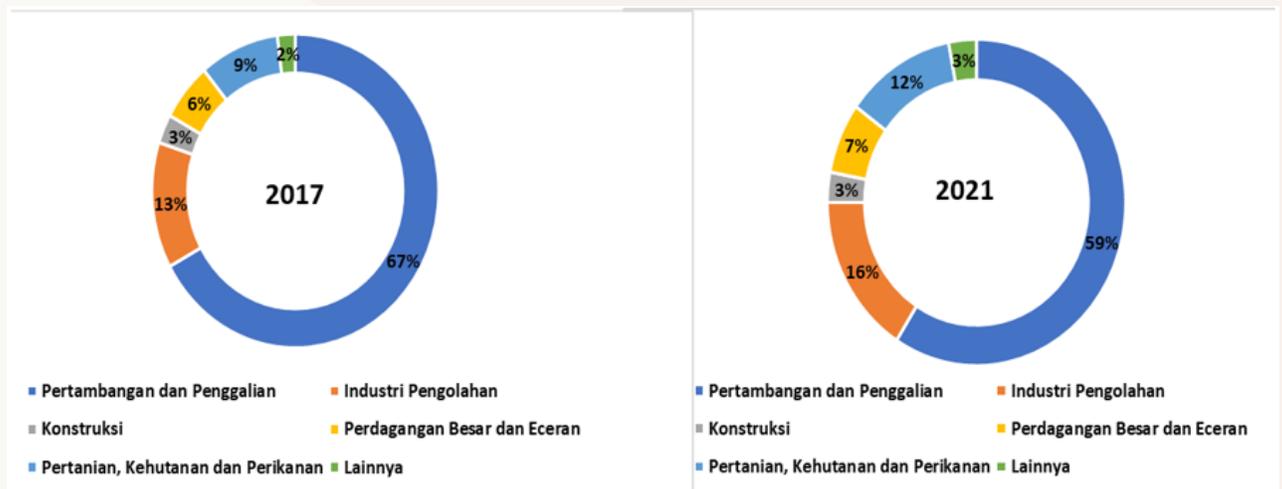
Sedangkan perkembangan nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2017 sebesar Rp. 79,189 Triliun dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 73,86 triliun rupiah. Namun pada tahun 2021 PDRB ADHK sudah mengalami perbaikan dan meningkat menjadi 74,229 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara total, nilai produksi dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu selama periode 2017- 2020 mengalami penurunan. Penurunan dominan terjadi pada penurunan produksi minyak pada sektor pertambangan dengan kontribusi mencapai 60% terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Sementara itu peningkatan nilai PDRB pada tahun 2021 dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya harga CPO.

4.3 STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH BERDASARKAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTUMBUHAN PDRB

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada PDRB atas dasar harga berlaku pada sisi produksi atau lapangan usaha dibangun oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kelima sektor ini secara akumulasi berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebesar 97%. Sedangkan sisanya sebesar 3% disumbangkan dari 12 sektor lainnya.

Pada PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017, sektor pertambangan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 67% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 59%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 13% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 16% pada tahun 2021. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 9% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 12% pada tahun 2021. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 6% pada tahun 2017 dan sedikit meningkat menjadi 7% pada tahun 2021. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan gabungan beberapa sektor selain lima sektor dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 3% pada tahun 2017 dan sedikit menurun menjadi 2% pada tahun 2021 hal ini dapat dilihat dari gambar 6 berikut.

Gambar 5. Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan 2021



Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)

Berdasarkan uraian struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2017- 2021, terlihat bahwa elemen-elemen penyusun perekonomian adalah sektor yang rentan terhadap dinamika pasar. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (*input*) dan sektor hilir (*output*) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan internasional.

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu 55,63% berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021 dan kontribusi ini menurun apabila dibanding tahun 2017 yang mencapai 61,79%. Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran sangat terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambangan dan industri besar di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain perekonomian Bengkalis adalah perekonomian terbuka dan sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan luar negeri (perekonomian terbuka) yang mengandalkan produk minyak dan gas.

Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal bruto (investasi). Sedangkan konsumsi pemerintah (*government expenditure*) memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Bengkalis saat ini sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan pada sektor minyak dan kaitanya dengan pembentukan modal pada perusahaan minyak dan gas di Riau. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dari sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian di masa mendatang seperti yang tergambar pada gambar 7 berikut :

Gambar 6. Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan 2021



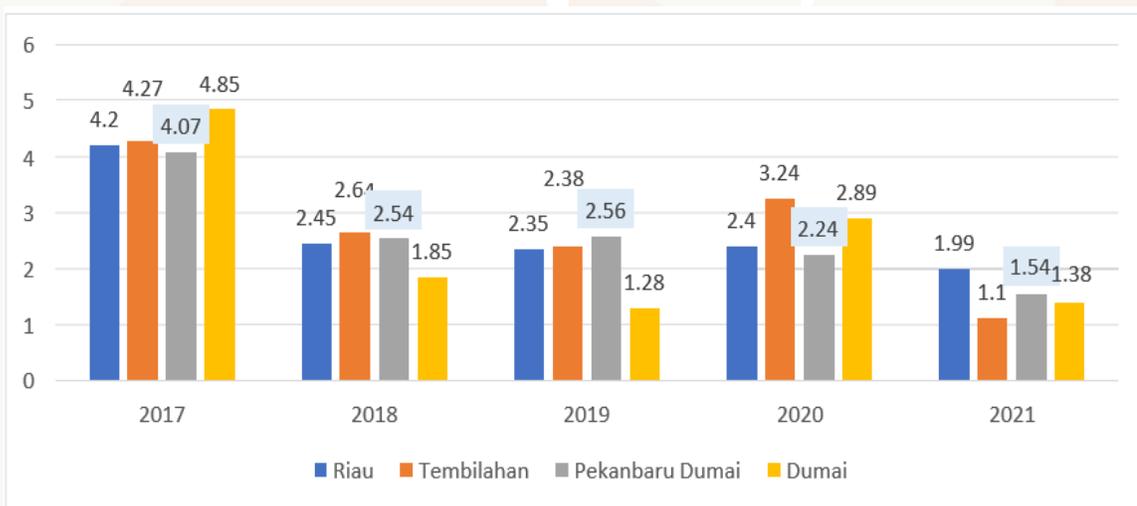
Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)

4.2 LAJU INFLASI

Inflasi merupakan dinamika ekonomi makro yang perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas input-output perekonomian daerah. Pengendalian inflasi dipandang penting untuk dilakukan agar tetap berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian tingkat inflasi harus tetap diupayakan oleh daerah dikarenakan laju inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, khususnya bagi daerah yang bukan merupakan produsen barang kebutuhan pokok dan alur distribusinya membutuhkan waktu tempuh yang relative besar. Kondisi tingkat inflasi di Provinsi Riau yang juga berdampak pada Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:

Gambar 7. Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2017-2021



Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)

Berdasarkan gambar di atas rujukan kondisi inflasi di Kabupaten Bengkalis menggunakan data perkembangan Kota Dumai dan Pekanbaru sebagai pusat alur distribusi barang dan jasa ke wilayah yang berada di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan data inflasi Provinsi Riau yang sesungguhnya merupakan agregat rata-rata untuk menggambarkan seluruh wilayah di Provinsi Riau digunakan sebagai rujukan pembandingan untuk menjelaskan kondisi umum inflasi di Kabupaten Bengkalis.

Inflasi tahun 2020 sebesar 2,89%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 berada pada 1,28%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum di daerah. Meski begitu, kenaikan inflasi yang terjadi masih dalam batas wajar dan termasuk dalam kategori rendah. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan

juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan. Menilik angka inflasi Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 2,89% dan Kota Pekanbaru sebesar 2,24%, maka dapat diperkirakan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis secara umum berkisar di angka 2% hingga 3%.

4.4 PDRB PERKAPITA

Salah satu indikator yang menyatakan adanya kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Indikator ini merupakan hasil bagi antara nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk pada tahun tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Dalam hal perhitungan PDRB per kapita, BPS selalu menggunakan standard PDRB atas dasar harga berlaku untuk menggambarkan kondisi PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 247,47 juta rupiah. Secara nominal mengalami penurunan selama tahun 2020 mencapai 199,99 juta rupiah. Penurunan PDRB per Kapita Kabupaten Bengkalis ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu penurunan nilai output total Kabupaten Bengkalis dan pertambahan jumlah penduduk. Penurunan nilai output total menggambarkan kinerja perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum.

Beberapa penyebab utamanya ditenggarai adalah melemahnya produksi minyak Bengkalis dan harga minyak dunia yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir berimbas pada menurunnya pendapatan daerah, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa secara umum. Penyebab utama lainnya disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang dengan laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkat sementara pertumbuhan PDRB cenderung menurun di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2016	2017	2018	2019*	2020**
- ADHB/ at current price	132.200,50	132.978,17	148.603,30	141.555,85	115.882,67
- ADHK/ at 2010 Constant Price	80.577,99	79.189,78	77.848,26	76.376,99	73.856,11
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/million rupiahs)					
- ADHB/ at current price	239,63	237,85	262,44	247,47	199,99
- ADHK/ at 2010 Constant Price	146,06	141,64	137,49	133,53	127,46
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	(4,14)	(3,90)	(3,02)	(2,91)	(3,02)
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	551.683	559.081	566.228	573.003	579.430
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,41	1,34	1,28	1,20	1,12

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5 PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Pada tahun 2020, dari 17 Lapangan Usaha ekonomi tercatat hampir sebagian besar mengalami pertumbuhan yang terkontraksi. Adanya kontraksi ini disebabkan oleh produksi minyak bumi yang semakin menurun, sejalan dengan menurunnya tingkat produksi minyak bumi nasional dan karena adanya Pandemi Covid-19.

Banyaknya sumur tua yang sudah tidak lagi beroperasi serta belum mampu menemukan sumur baru guna memacu produksi secara maksimal mengakibatkan *lifting* produksi minyak di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan sehingga sektor usaha pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan pertumbuhan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan berkontraksi negatif.

Pada kurun waktu 2016-2020 lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,42 persen, kemudian lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

dengan rata-rata pertumbuhan 10,04 persen, dan yang ketiga lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata pertumbuhan 8,16 persen. Ketiga kategori ini selama tahun 2020 berkontribusi dibawah satu persen terhadap perekonomian di Kabupaten Bengkalis.

Uraian selanjutnya merupakan penjelasan mengenai PDRB Kabupaten Bengkalis menurut lapangan usaha yang dirinci menjadi 17 kategori. Pada setiap rincian kategori lapangan usaha terdapat pembahasan mengenai tabel masing-masing kategori, meliputi nilai PDRB kategori, kontribusinya, laju pertumbuhan dan laju implisit setiap kategori.

4.5.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup 3 (tiga) sub kategori yaitu sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu serta sub kategori Perikanan. Sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dibagi lagi menjadi 5 golongan yaitu: Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan serta Jasa Pertanian dan Perburuan.

Nilai tambah yang diberikan kategori ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun kontribusinya mengalami kecenderungan berfluktuatif. Kontribusi kategori ini meningkat pada tahun 2020, dan menempati peringkat ketiga terhadap ekonomi Kabupaten Bengkalis. Secara rata-rata, kontribusi kategori ini selama kurun waktu 2016-2020 mencapai 12,65 persen.

Pada tahun 2020 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,90 persen, mengalami sedikit percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,43 persen. Hal ini disebabkan utamanya karena harga kelapa sawit yang masih tertekan mengakibatkan hasil produksi perkebunan kelapa sawit masih sulit tumbuh lebih tinggi. Hal ini juga ditandai dengan besaran laju implisit 6,06 persen.

Tabel 14. Kontribusi, Laju Pertumbuhan, dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	11.201.413,45	11.985.421,98	12.256.418,55	13.053.199,89	14.662.023,41
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/	7.712.296,91	8.113.972,37	8.556.953,80	9.021.967,83	9.554.639,74

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>					
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	8,47	9,01	8,25	9,22	12,65
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	3,65	5,21	5,46	5,43	5,90
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	6,96	1,70	-3,03	1,01	6,06

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.2 Pertambangan dan Penggalian

Kategori pertambangan dan penggalian yang terdapat di Kabupaten Bengkalis menyumbang sebesar 55,93 persen terhadap perekonomian Bengkalis pada tahun 2020. Kontribusi pada kategori ini begitu besar, rata-rata sekitar 65,30 persen, namun dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan.

Dalam lima tahun terakhir terjadi kontraksi pertumbuhan karena penurunan produksi minyak dan gas bumi. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan harga minyak mentah yang ditunjukkan pada laju implisit sektor ini 25,10 persen.

Tabel 15. Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	91.923.660,81	88.742.889,96	102.564.234,46	92.403.776,84	64.817.022,52
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ <i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>	52.329.818,04	48.890.117,64	46.343.393,91	43.104.200,41	40.365.834,78
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	69,53	66,73	69,02	65,28	55,93
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	-6,29	-6,57	-5,21	-6,99	-6,35
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	-1,04	3,33	21,93	-3,14	-25,10

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.3 Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah penggerak ekonomi utama Kabupaten Bengkulu. Komoditas unggulan yang dihasilkan di industri pengolahan Kabupaten Bengkulu adalah CPO (*Crude Palm Oil*).

Pada tahun 2020, kategori ini tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kategori ini sebesar 3 persen, melambat dibanding tahun lalu sebesar 2,08 persen. Meskipun demikian kategori ini masih memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 11,84 persen bagi perekonomian Bengkulu.

Tabel 16. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, dan Laju Implisit Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ GRD Current Prices (million rupiah)	15.465.796,72	17.154.252,34	17.572.815,19	18.490.471,37	19.691.575,68
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)	11.849.773,19	13.024.989,17	13.294.035,65	14.096.473,44	14.520.026,69
3	Kontribusi (persen)/ Contribution (percent)	11,70	12,90	11,83	13,06	16,99
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/Growth Rate of GRDP (persen)	6,75	9,92	2,07	6,04	3,00
5	Laju Implisit (persen)/ Growth Rate of Implicit (persen)	3,09	0,91	0,37	-0,77	3,39

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 41,19 miliar rupiah atau sekitar 0,04 persen terhadap perekonomian Bengkalis pada tahun 2020. Meski kontribusinya kecil namun menunjukkan arah positif.

Pertumbuhan kategori ini didukung oleh meningkatnya jumlah konsumen pengguna listrik. Sejalan dengan misi pemerintah daerah yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur dan elektrifikasi. Pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 8,16 persen di tahun 2020. Secara rata-rata, kategori ini tumbuh mencapai 7,69 persen dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 17. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ GRD Current Prices (million rupiah)	24.201,21	31.769,01	34.612,46	37.423,43	41.192,81
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)	16.306,56	17.100,21	18.012,87	18.489,71	19.998,46
3	Kontribusi (persen)/ Contribution (percent)	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/Growth Rate of GRDP (persen)	17,42	4,87	5,34	2,65	8,16
5	Laju Implisit (persen)/ Growth Rate of Implicit (persen)	22,86	25,18	3,43	5,33	1,77

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Kategori ini juga mencakup pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

Kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Bengkalis adalah sebesar 0,01 persen mengalami pertumbuhan 0,78 persen di tahun 2020. Walaupun kontribusinya tergolong kecil namun kategori ini memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kategori lainnya.

Tabel 18. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ GRD Current Prices (million rupiah)	12.379,98	14.148,83	14.389,98	14.907,96	15.221,06
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)	10.559,62	11.563,43	11.636,83	11.907,29	12.000,17
3	Kontribusi (persen)/ Contribution (percent)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/Growth Rate of GRDP (persen)	1,45	9,51	0,63	2,32	0,78
5	Laju Implisit (persen)/ Growth Rate of Implicit (persen)	3,72	4,37	1,06	1,25	1,31

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.6 Konstruksi

Pada tahun 2020, kategori Konstruksi ini mencapai 4,18 triliun rupiah atau sekitar 3,61 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bengkalis. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2016-2020 yaitu berkisar 2,91 persen. Kontribusi kategori ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 3,01 persen.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kabupaten Bengkalis berada dikisaran 5-6 persen setiap tahunnya. Sementara laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mengalami kontraksi

sebesar 2,01 persen. Pandemi Covid-19 merupakan faktor utama yang menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Adanya pengurangan anggaran proyek konstruksi pemerintah yang dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga menyebabkan banyak realisasi proyek infrastruktur yang tertunda.

Tabel 19. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Konstruksi Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ GRD Current Prices (million rupiah)	3.295.536,27	3.658.669,79	3.974.961,22	4.253.804,45	4.183.956,25
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)	2.037.913,86	2.179.100,86	2.307.267,04	2.437.250,59	2.388.261,85
3	Kontribusi (persen)/ Contribution (percent)	2,49	2,75	2,67	3,01	3,61
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/Growth Rate of GRDP (persen)	5,82	6,93	5,88	5,63	-2,01
5	Laju Implisit (persen)/ Growth Rate of Implicit (persen)	6,15	3,83	2,61	1,31	0,38

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 memiliki kontribusi mencapai 8,46 triliun rupiah atau sekitar 7,30 persen. Nilai ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu dengan kontribusi 6,49 persen.

Namun, sejak adanya pemberlakuan PSBB selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, terjadi penutupan gerai penjualan secara signifikan, dan masyarakat mulai menahan diri untuk *stay at home* sehingga aktivitas belanja keluar menurun. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan yang mengalami kontraksi sebesar 11,92 persen.

Tabel 20. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ GRD Current Prices (million rupiah)	6.924.146,40	7.758.474,88	8.318.439,85	9.186.855,88	8.455.506,01
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)	4.212.214,88	4.465.445,56	4.733.215,66	4.974.437,63	4.381.399,09
3	Kontribusi (persen)/ Contribution (percent)	5,24	5,83	5,60	6,49	7,30
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/Growth Rate of GRDP (persen)	5,22	6,01	6,00	5,10	-11,92
5	Laju Implisit (persen)/ Growth Rate of Implicit (persen)	6,93	5,70	1,15	5,08	4,50

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Penghitungan nilai tambah kategori ini di Kabupaten Bengkalis berasal dari 4 subkategori kecuali angkutan rel dan Angkutan Udara.

Kategori Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2020 cukup stabil. Namun, pertumbuhan kategori ini mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 25,70 persen. Hal ini disebabkan karena adanya imbauan pemerintah terkait larangan mudik, pembatasan penggunaan kapasitas transportasi pribadi dan umum sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran Covid-19 yang menyebabkan aktivitas transportasi cukup jauh berkurang.

Tabel 21. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ GRD Current Prices (million rupiah)	297.088,40	336.470,36	349.060,23	370.241,14	291.275,64
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)	210.267,05	227.306,27	231.407,35	240.602,31	178.767,38
3	Kontribusi (persen)/ Contribution (percent)	0,22	0,25	0,23	0,26	0,25
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/Growth Rate of GRDP (persen)	2,98	8,10	1,80	3,97	-25,70
5	Laju Implisit (persen)/ Growth Rate of Implicit (persen)	6,54	4,77	1,90	2,01	5,88

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2020, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis sebesar 0,27 persen. Besaran kontribusi tersebut sama dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penggerak ekonomi Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya didukung dari sektor pariwisata.

Secara keseluruhan, dari tahun 2016 pada kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan yang relatif stabil hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 19,03 persen dampak dari keharusan mengikuti aturan PSBB saat terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel 22. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ GRD Current Prices (million rupiah)	329.788,1	352.473,7	372.127,7	382.085,8	311.107,59
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)	175.193,88	182.856,93	191.307,24	195.587,98	158.367,10
3	Kontribusi (persen)/ Contribution (percent)	0,25	0,27	0,25	0,27	0,27
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/Growth Rate of GRDP (persen)	2,56	4,37	4,62	2,24	-19,03
5	Laju Implisit (persen)/ Growth Rate of Implicit (persen)	7,73	2,40	0,91	0,43	0,56

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan

menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2016-2020 rata-rata sekitar 0,34 persen.

Laju pertumbuhannya cukup menjanjikan, tahun 2020 tercatat sebesar 10,45 persen. Hal ini didorong oleh adanya transformasi digital yang terjadi pada aktivitas pemerintah, bisnis maupun masyarakat. Kategori ini mampu tumbuh selama masa Pandemi Covid-19. Adanya kenaikan pada kontribusi kategori ini disebabkan adanya fenomena WFH dan SFH yang memicu peningkatan rata-rata data penggunaan internet.

Tabel 23. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	357.966,16	405.508,40	436.836,00	487.841,59	538.280,74
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ <i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>	320.250,30	337.634,61	356.390,21	388.237,74	428.808,58
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,27	0,30	0,29	0,34	0,46
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	4,95	5,43	5,55	8,94	10,45
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	1,82	7,45	2,06	2,52	-0,10

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.11 Jasa Keuangan Dan Asuransi

Pada tahun 2020 kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi sebesar 0,33 persen bagi total perekonomian Kabupaten Bengkalis. Kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,11 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan kategori ini tidak terlepas dari pertumbuhan kategori lainnya.

Tabel 24. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	323.211,55	333.340,01	357.638,79	363.333,01	377.081,81
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ <i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>	235.010,10	229.893,91	235.570,93	236.045,99	245.753,07
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,24	0,25	0,24	0,26	0,33
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	8,92	-2,18	2,47	0,20	4,11
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	2,87	5,43	4,70	1,39	-0,32

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.12 Real Estate

Kategori Real Estat berkontribusi pada PDRB Bengkalis kurang dari 1 persen. Selama 2016-2020, kontribusi kategori ini cenderung meningkat. Pada 2016 sebesar 0,25 persen dan pada 2020 menjadi 0,35 persen. Namun laju pertumbuhan ekonomi kategori ini terus berfluktuatif. Pada tahun 2020, Kategori Real Estat tumbuh sebesar 1,79 persen, melambat dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan lesunya iklim usaha karena Pandemi Covid-19 yang menahan laju pertumbuhan pada kategori ini

Tabel 25. Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Real Estate Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	326.124,59	349.289,70	375.949,32	400.040,72	408.952,42

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ <i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>	228.475,26	236.064,56	247.041,56	262.531,06	267.230,37
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,25	0,26	0,25	0,28	0,35
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	1,47	3,32	4,65	6,27	1,79
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	6,18	3,66	2,85	0,13	0,43

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan berperan sebagai penunjang aktivitas dari kategori lainnya. Cakupan dari kategori ini antara lain: aktivitas profesional, ilmiah dan teknis serta jasa persewaan.

Selama lima tahun terakhir, kontribusi ekonomi pada Kategori Jasa Perusahaan sangat kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Bengkalis. Laju pertumbuhannya berfluktuatif dari 6,05 persen pada tahun 2016 menjadi kontraksi pada tahun 2020 sebesar 23,16 persen, karena dampak pembatalan perjalanan haji dan umroh.

Tabel 26. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	3.916,98	4.458,99	4.998,32	5.324,41	4.205,01
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/	2.766,13	3.015,25	3.284,87	3.393,27	2.607,39

	<i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>					
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	6,05	9,01	8,94	3,30	-23,16
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	3,75	4,43	2,89	3,12	2,78

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Peranan kategori ini dalam lima tahun terakhir terus mengalami fluktuatif.

Sejak tahun 2016-2020, kontribusinya terus meningkat dari 0,78 persen di tahun 2016 menjadi 1,03 persen di tahun 2020. Sementara laju pertumbuhan pada kategori ini mengalami kontraksi sebesar 2,22 persen, yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 27. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	1.036.720,92	1.091.009,55	1.123.653,65	1.179.860,44	1.195.661,04
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ <i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>	800.801,99	808.558,08	816.481,95	846.224,81	827.438,62

3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,78	0,82	0,76	0,83	1,03
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	0,17	0,97	0,98	3,64	-2,22
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	3,26	4,23	1,99	1,31	3,64

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.15 Jasa Pendidikan

Pada tahun 2020 Kategori Jasa Pendidikan menyumbang sebesar 0,39 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bengkalis, kontribusinya meningkat dari tahun sebelumnya. Kontribusi kategori ini cenderung stabil selama 5 (lima) tahun terakhir.

Sementara laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Bengkalis terus mengalami fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 Lapangan Usaha Jasa Pendidikan ini tumbuh sebesar 1,87 yang dipengaruhi oleh prioritas kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran Covid-19.

Tabel 28. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	329.532,63	365.450,99	402.067,84	431.039,31	447.486,55
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/ <i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>	199.766,11	207.247,66	225.729,06	238.624,06	243.086,33
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,25	0,27	0,27	0,30	0,39

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	2,49	3,75	8,92	5,71	1,87
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	7,72	6,90	1,01	1,41	1,91

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kontribusi kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Perkembangan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mendorong peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kategori ini.

Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis sebesar 0,07 persen, maka pada tahun 2020 kontribusinya naik menjadi 0,12 persen. Sementara laju pertumbuhan pada kategori ini sebesar 10,04 persen, meningkat dibanding tahun lalu yang dipengaruhi oleh prioritas kebijakan pemerintah untuk membatasi penyebaran Covid-19.

Tabel 29. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	90.326,82	98.688,92	109.650,71	122.310,52	137.672,62
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/	59.743,03	63.218,19	67.292,86	71.928,19	79.149,78

	<i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>					
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,07	0,07	0,07	0,09	0,12
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	2,24	5,82	6,45	6,89	10,04
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	4,53	3,25	4,38	4,36	2,29

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.5.17 Jasa Lainnya

Cakupan aktivitas dari Kategori Jasa Lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kebudayaan, hiburan dan rekreasi, jasa kegiatan organisasi, jasa reparasi, jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Kontribusi Kategori Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu relatif kecil dan cenderung meningkat.

Sejak tahun 2016-2020, kontribusinya terus meningkat dari 0,20 persen di tahun 2016, menjadi 0,26 persen di tahun 2020. Sementara laju pertumbuhannya hingga tahun 2019 selalu positif dengan rata-rata dalam empat tahun terakhir 9,13 persen. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan kategori ini mengalami kontraksi sebesar 20,23 persen yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan lesunya aktivitas lapangan usaha ini.

Tabel 30. PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Jasa Lainnya Kabupaten Bengkulu, 2016-2020

	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB ADHB (juta rupiah)/ <i>GRD Current Prices (million rupiah)</i>	258.692,46	295.852,32	335.445,58	373.329,86	304.446,29
2	PDRB ADHK (juta rupiah)/	176.834,63	191.697,74	209.235,84	229.088,06	182.743,55

	<i>GRDP 2010 Constant Market Prices (million rupiah)</i>					
3	Kontribusi (persen)/ <i>Contribution (percent)</i>	0,20	0,22	0,23	0,26	0,26
4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)/ <i>Growth Rate of GRDP (persen)</i>	9,46	8,41	9,15	9,49	-20,23
5	Laju Implisit (persen)/ <i>Growth Rate of Implicit (persen)</i>	6,64	5,50	3,88	1,65	2,23

Sumber BPS (PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020)

* Angka sementara/Preliminary Figures

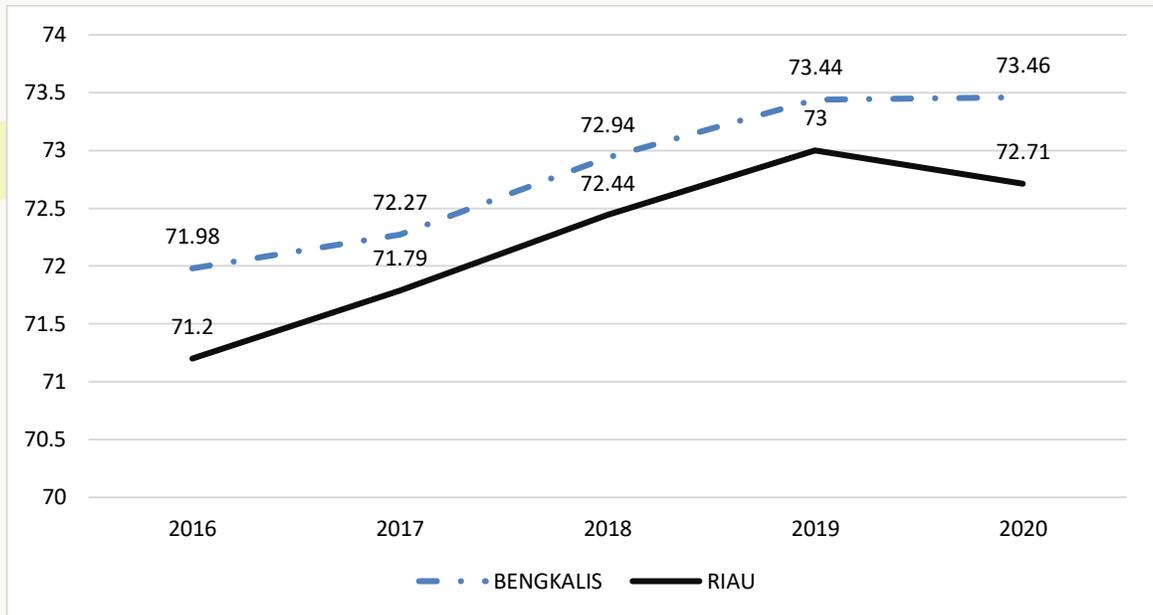
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4.7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

Gambar 8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2020



Sumber : Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2021)

Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu menunjukkan perkembangan yang baik dan terus meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Bengkulu sebesar 71,98 dan terus mengalami peningkatan hingga 73,46 pada tahun 2020. Nilai IPM Kabupaten Bengkulu telah termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian IPM Kabupaten Bengkulu mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu sebesar 1,48 selama lima tahun terakhir. Perkembangan IPM di Kabupaten Bengkulu yang cukup baik ini memperlihatkan bahwa hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkulu selama periode 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu mengalami penurunan khususnya pada dimensi pendapatan masyarakat sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 yang mengganggu aktifitas berusaha di Kabupaten Bengkulu dibandingkan kondisi 4 (empat) tahun sebelumnya.

4.8 ANGKA KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.

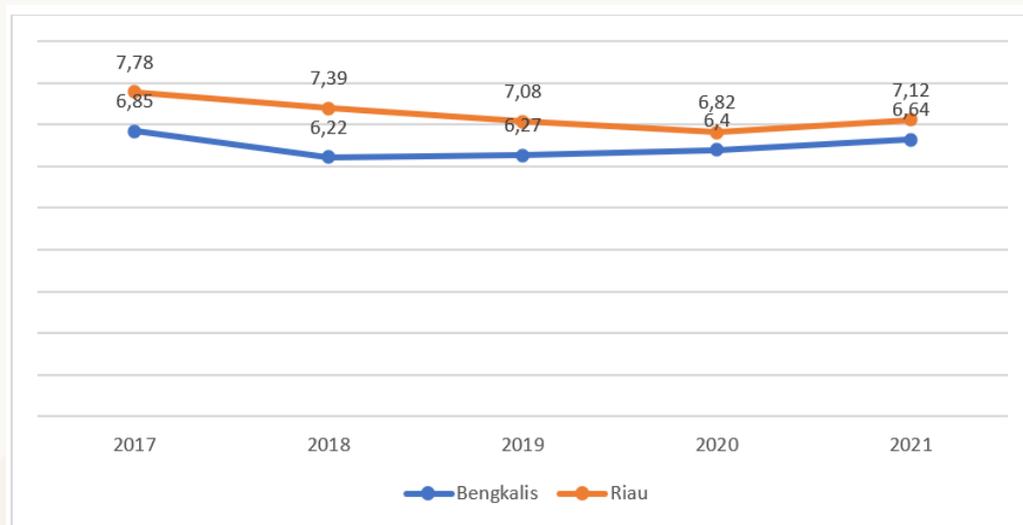
Tabel 31. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis tahun 2017 - 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2017	496.657	38,19	6,85	0,95	0,24
2018	508.633	35,11	6,22	0,87	0,18
2019	533.123	35,83	6,27	0,50	0,07
2020	581.416	36,96	6,40	0,72	0,14
2021	604.925	37,66	6,64	0,73	0,13

Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)

Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskin semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount ratio* atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. *Headcount index* memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak bisa memberikan informasi 'seberapa miskin' orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.

Gambar 9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2017 - 2021



Sumber : Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2022)

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu mengalami penurunan pada tahun 2017 menuju tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami sedikit peningkatan meskipun masih berada di bawah persentase kemiskinan provinsi. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan Kabupaten Bengkulu mencapai 6,64%, lebih rendah dibandingkan persentase kemiskinan Provinsi Riau yang berada pada angka 7,12%.

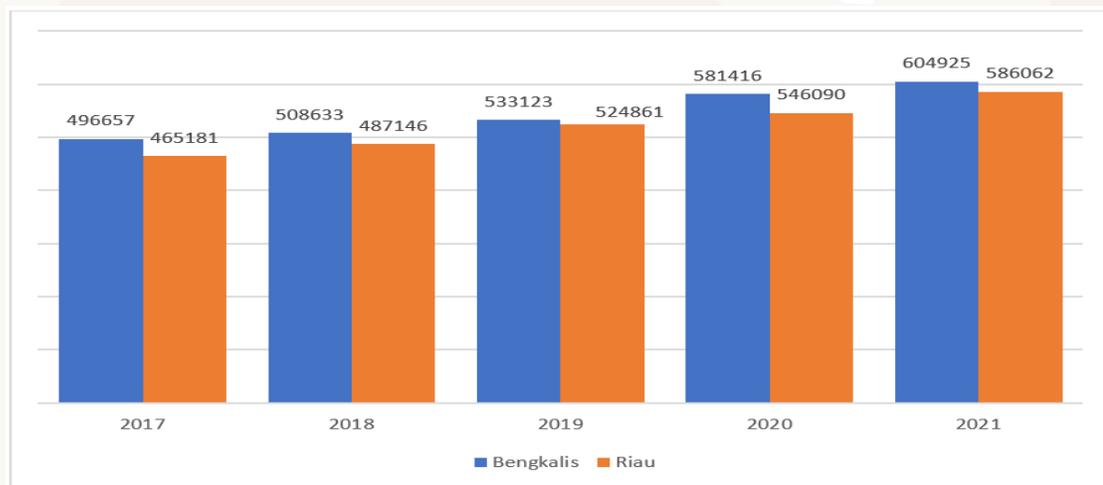
Secara umum pada periode 2017-2021 garis kemiskinan Kabupaten Bengkulu terus mengalami kenaikan dan selalu berada di atas garis kemiskinan Provinsi Riau. Kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 menjadi 6,64% disinyalir sebagai akibat naiknya garis kemiskinan di Kabupaten Bengkulu sebesar 4,04% pada masa pandemi tahun 2021, dari sebelumnya garis kemiskinan sebesar Rp 581.416 tahun 2020 menjadi Rp 604.925 pada tahun 2021. Kenaikan garis kemiskinan ini membuat sebagian masyarakat masuk kedalam kategori miskin pada tahun 2021.

Indeks kedalaman kemiskinan atau disebut juga dengan *poverty gap* menggambarkan jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Perkembangan *poverty gap* di Kabupaten Bengkulu semakin membaik, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan

mendekati angka nol. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis selama periode 2017-2021 semakin tinggi dan berkembang melewati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2017-2021, menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis semakin merata. Hal ini ditunjukkan oleh IndeksKeparahan Kemiskinan yang mendekati nol dari tahun 2017 dari 0,24 menjadi 0,13 pada tahun 2021 seperti yang di disajikan pada gambar 11 berikut;

Gambar 10. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2017 – 2021

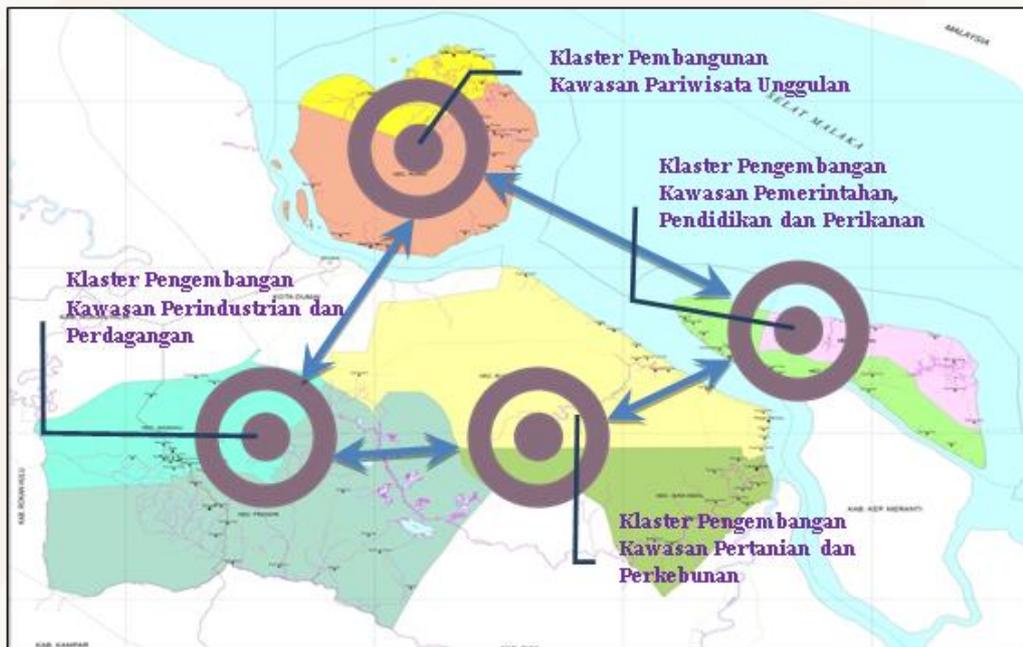


Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2022)

BAB V PELUANG INVESTASI KABUPATEN BENGKALIS

5.1 KLAS TER PEMBANGUNAN KAWASAN KABUPATEN BENGKALIS

Secara geografis dan demografi karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi empat kawasan yang memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri, sehingga dalam pendekatan spasial (keruangan) pelaksanaan program pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) klater pembangunan kawasan. Pembangunan secara spasial ini dimaksudkan agar potensi keruangan dan integrasi dari pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Klaster-klater pembangunan kawasan ini dapat dideskripsikan pada gambar berikut ini:



Gambar 11. Klaster Pembangunan Kawasan Kabupaten Bengkalis

Keempat klaster pembangunan kawasan di Kabupaten Bengkalis seperti yang tertera pada Gambar 6.2 tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi yang telah tersedia di kawasan tersebut. Potensi ini perlu diperkuat sehingga membentuk struktur wilayah dan struktur perekonomian lokal yang unggul dari kawasan-kawasan tersebut. Keempat klaster pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Klaster pembangunan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan dan Pendidikan dan Perikanan.
2. Klaster pembangunan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian dan Perkebunan.
3. Klaster pembangunan Kecamatan Rупat dan Rупat Utara sebagai Kawasan pariwisata unggulan.
4. Klaster pembangunan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan.

Keterpaduan pembangunan di klaster-klaster tersebut akan menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien baik dari segi potensi keruangan maupun potensi alami kawasan tersebut. Pembangunan yang berorientasi pada klaster-klaster tersebut perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur konektivitas antarkawasan yaitu jaringan jalan, jembatan dan penyeberangan (ro-ro) yang kuat dan lancar serta pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat seperti air bersih, listrik dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pengembangan keempat klaster pembangunan kawasan ini juga sejalan dengan pola ruang pada RTRW Provinsi Riau, arah kebijakan pembangunan spasial Provinsi Riau dan agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJM Nasional 2020-2024 telah tertuang prioritas pembangunan nasional melalui kementerian dan Lembaga Negara antara lain seperti prioritas pengembangan sektor unggulan di Provinsi Riau yaitu pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi. Komoditas-komoditas tersebut merupakan potensi alami di wilayah klaster pembangunan kawasan ke 2 dan ke 4.

Selain itu, untuk pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas juga meliputi pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang tersebar di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang di Riau terdapat di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Prioritas ini merupakan potensi pada klaster 1 dan klaster 2. Sedangkan klaster 1 merupakan kawasan PKSN pariwisata nasional. Pemerintah pusat telah menekankan prioritas pengembangan Kawasan Pariwisata Rупat sebagai Kawasan Wisata Nasional. Hal ini tentunya sinergi dengan kebijakan klaster pengembangan kawasan pariwisata Pulau Rупat.

5.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan penetapan kinerja/indikator kinerja pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Sasaran dan tujuan pembangunan sesuai target dari pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Dan Misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berikut Hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah tahun 2021 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah daerah berdasarkan aspek, fokus, bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dimana hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 31 berikut :

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,31	9	6,62	
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,88	9,70	
	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,2	71,36	70,39	
	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,07	0,06	0,02	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66	36,89	66,67	
	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	90,69	91,08	93,36	
II	Aspek Pelayanan Umum					
	Layanan Urusan Wajib Dasar					
	Pendidikan					
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun (SD)	Persen	99,66	100,31	90,87	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun (SMP)	Persen	94,56	93,8	87,41	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,72	109,58	104,3	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	97,41	96,82	101,91	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	98,06	98,22	90,87	

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	86,5	87,84	87,41	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90	95	89,18	
	Kesehatan					
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KLH	Per 1.000 Penduduk	4	3,7	4,6	
	Angka Kematian Balita per 1000 KLH	Per 1.000 Penduduk	4,1	3,7	4,9	
	Angka Kematian Neonatal per 1000 KLH	Per 1.000 Penduduk	3,6	3,2	0,0	
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KLH	Per 1.000 Penduduk	201	191	189	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada BALITA	Persen	20	20	8,43	
	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	65	65	6,1	
	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	Per 1.000 Penduduk	<1	0,02	0	
	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru	Angka	376	376	109	
	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	0,01	0,01	46	
	Rumah Sakit (RSUD KECAMATAN MANDAU)					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85	88	77,75	
	Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	≥ 80	≥ 80	≥ 80	
	Cost Recovery Rate	Persen	35	38	43,66	
	Rumah Sakit (RSUD Bengkalis)					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87,72	88	77,11	
	Status Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	
	Cost Recovery Rate	Persen	35	38	33,29	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum:					
	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	52,53	53,50		
	Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	Kilo Meter	465,68	480,087	211,854	
	Panjang Jalan Poros dan jembatan pada wilayah perbatasan dalam kondisi baik	Kilo Meter	n/a	11,041		
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	100	98,89		
	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Persen	68,95	69,18	69,18	
	Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	Kilo Meter	31,6	31,6	36,6	
	Panjang infrastruktur pengaman daerah rawan longsor	Kilo Meter	na	0	4,44	
	Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	Unit	4	4	4	
	Persentase luas kawasan bebas banjir	Persen	na	77,1	77,1	
	Penataan Ruang:					
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Status	Ada	Ada	Ada	

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase RT akses air bersih	Persen	35,20%	58,03%	85,31%	
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	na	90	90	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	89,67%	91,32%	75,08%	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Persentase lingkungan yang sehat dan aman didukung Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Persen	46,45	48	32,26	
	Rasio permukiman layak huni	Rasio	97,79	97,85	97,85	
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	4,404	4,28	16,72	
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
	Trantibumlinmas:					
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	80	83	80	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100	100	80	
	Kebencanaan:					
	Indeks Resiko Bencana	Persen	156,4* (BNPB)	109,48	-	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persen	100	100	100	
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	27	95	102	
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persen	95	95	82,23	
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	99,91	
	Kebakaran:					
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	67,65	
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	100	47%	
	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	na	100	80%	
	Sosial					
	Persentase Tuna Sosial Terlantar (terutama Gelandangan Dan Pengemis) di luar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	76	100	100	
	Persentase Lanjut Usia Terlantar di luar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	69	74	100	
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM)	Persen	100	100	100	
	Persentase Disabilitas Terlantar di luar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	96	96	100	

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase Anak Terlantar di luar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
	Tenaga Kerja					
	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	56,2	95	53,58	
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100*	100	100	
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	22	96	50	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	55	55,5	54,1	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indek	90,07	90,5	90,07	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0	10	100	
	Persentase layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	0	
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	0	
	Ketahanan Pangan					
	Indeks ketahanan Pangan	persen	65.95	70	61.15	
	Persentase desa bebas dari status rawa pangan	persen	75.5	81	81.9	
	skor pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87.9	88.5	88.4	
	Pertanahan					
	Lingkungan Hidup					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	70,67	74,25	70,55	
	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	70	72	84,86	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	70,67	70,7	54,25	
	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	75	80	84	
	Admintsrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Persentase penduduk memiliki KTP Elektronik	Persen	99	99	100	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	23,08	35	40,26	
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	Persen	95	95	90,31	
	Cakupan kepemilikan akte kematian	Persen	94	100	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks	91	91	95,10	
	Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan	Persen	60	60	100	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	Angka	24	38	100%	
	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100%	
	Persentase Bumdesa Aktif	Angka	136	136	100%	
	Kontribusi PADes Terhadap APBDes	Persen	0,4	0,5	100%	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,52	93	
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,51	2,51	111	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Persen	65	66	105	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,5	18,5	85	
	Perhubungan					
	Cakupan konektivitas wilayah	Persen	90	91	79	
	Rasio ijin trayek	Unit	0,000893	0,001	0,000035	
	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	14.893	21.203	12.811	
	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,35	2	0,000311	
	Pemasangan rambu-rambu	Persen	20	21	31,25%	
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan:					
	a. Orang	Orang	na	910.000	915.258	
	b. Barang	Barang	na	28.800	69.834	
	Cakupan sarana dan prasarana transportasi layak operasi	Persen	95	95	76,47%	
	Komunikasi dan Informatika					
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Angka	1,8	1,8	1,8	
	Indeks keterbukaan informasi publik (KIP)	Persen	70	75	97	
	Statistik					
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	Persen	43,7	46,31	48,18%	
	Persentase UKM non BPR atau LKM Aktif	Persen	99,36	100	n/a	
	Persentase BPR atau LKM Aktif	Persen	47,84	49,28	n/a	
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99,38	100	n/a	
	Penanaman Modal					
	Nilai investasi (PMDN/PMA)	Persen	5,2 Terliun	4,6 Terliun	5,7 Terliun	-
	Kepemudaan dan Olahraga					
	Jumlah pemuda berprestasi atau pelopor	Angka	na	2	2	
	Jumlah prestasi olahraga	Cabang	na	10	8	
	Persentase Wirausaha Muda	Persen	75	80	0,18	
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	80	82	38,82	

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	49	49	66	
	Statistik					
	Persentase Satu Data Kabupaten Bengkalis	Persen	65	70	84,21	
	Persandian					
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktivitas komunikasi dan informasi	Persen	0	12	21,41	
	Kebudayaan					
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	6	3	
	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	15	15	15	
	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Jumlah	na	2	1	
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Jumlah	15	15	15	
	Perpustakaan					
	Pembangunan literasi masyarakat	Jumlah	135	200	135	
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	0,052	0,052	0,0005	
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	61.796	260.546	91.172	
	Kearsipan					
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80	80	83%	
	Layanan Urusan Pilihan					
	Kelautan dan Perikanan					
	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	7013	6852	8000,04	
	Pendapatan Rata-rata Nelayan	Juta Rupiah/tahun	37,2	39,6	44,64	
	Pariwisata					
	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah	799	1.458	0	
	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah	20.397	21.000	103.635	
	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	47	47	6	
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	6	7	0	
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	persen	-	0.05	0,0000003	
	Pertanian					
	Tanaman Pangan, Holtukultura dan Peternakan					
	Produksi tanaman pangan (Padi)	Ton	-	20.744,50	*18.950,14	
	Produksi tanaman holtukultura	Ton	-	987,05	*915,5	
	Populasi ternak sapi	Ekor	16.570	16.579	17.312	
	Perkebunan					
	Produksi Tanaman Perkebunan :	Ton				
	Karet (K3 = Kadar Karet Kering)		19.142	19.142	19.142	

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kelapa (Kopra setara 4,5 butir kelapa)		4.062	4.062	4.062	
	Kelapa sawit (setara Cpo)		262.292	262.292	262.292	
	Sagu (Tepung sagu kering)		3.189	3.189	3.189	
	Produktivitas Tanaman Perkebunan :	Ton				
	Karet (K3 = Kadar Karet Kering)		0,908	0,908	0,908	
	Kelapa (Kopra setara 4,5 butir kelapa)		0,893	0,893	0,893	
	Kelapa sawit (setara Cpo)		2,305	2,305	2,305	
	Sagu (Tepung sagu kering)		1,886	1,886	1,886	
	Persentase perkebun dengan penghasilan minimal setara UMR	Persen	-	62,67	56,71	
	Perdagangan					
	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Penting bagi Masyarakat	Persen	70	70	96	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	40	45	98,17	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	16	32	-	
	Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	Persen	na	100	100	
	Perindustrian					
	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	Persen	40	45	94,9	
	Persentase Pelaku Usaha IKM yang difasilitasi izin produknya	Persen	65	70	-	
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	Persen	na	17,01	-	
	Transmigrasi					
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persen	na	100	n/a	
	Layanan Urusan Penunjang					
	Sekretariat Daerah					
	Persentase cakupan fasilitasi bukan kewenangan langsung pemerintah yang di atur dalam perundang-undangan	Persen	100	100	n/a	
	Persentase cakupan fasilitasi penyelenggaraan Kerjasama pemerintahdaerah dengan berbagai pihak	Persen	100	100	n/a	
	Persentase cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan daerah	Persen	100	100	n/a	
	Persentase cakupan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertib administrasi	Persen	100	100	n/a	
	Persentase cakupan pemantauan, pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persen	100	100	n/a	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Predikat	B	B	B	
	Sekretariat DPRD					

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) (Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan)	Status	Ada	Ada	Ada	
	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan	Status	Ada	Ada	Ada	
	Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran	Status	Ada	Ada	Ada	
	Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan	Persen	100	100	97,8	
	Unsur Pendukung					
	Perencanaan					
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Status	Ada	Ada	Ada	
	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA	Status	Ada	Ada	Ada	
	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Status	Ada	Ada	Ada	
	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	Persen	95	96	96	
	Persentase penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	Persen	93	95	100	
	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	94,83	94,83	91,9	
	Keuangan					
	Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	Persen	40	45	45	
	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	8,44 %	10,76	n/a	
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Angka	WTP	WTP	WTP	
	Kepegawaian					
	Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	Persen	1,37	1,5	1,7	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,72	3,79	3,47	
	Pendidikan dan Pelatihan					
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Persen	100	100	98,37	
	Penelitian dan Pengembangan					
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Persen	60	65	93%	
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	1.774 (sangat inovatif)	60 (sangat inovatif)	48,30 (Inovatif)	
	Pengelolaan Perbatasan Daerah					
	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Persen	100	100	n/a	
	Unsur Pengawas					
	Inspektorat					

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	
	Layanan Urusan Kewilayahan					
	Kecamatan	Indeks	83	85	n/a	
	Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Orang	100	100	190	
	Persentase partisipasi politik masyarakat	Persen	70	70	71,75	
	Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	100	60	
	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	Persen	10	10	1,2	
	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang kerukunan umat beragama	orang	100	100	n/a	
III	Aspek Daya Saing					
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	50	50	52,43	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Keterangan	WTP	WTP	WTP	

5.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH DAERAH TRI WULAN 1 DAN 2 TAHUN 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga mempunyai program unggulannya sesuai dengan Visi dan Misi daerah, dimana pada tahun 2021 capaian sementara pelaksanaan program unggulan daerah dapat dilihat pada hasil evaluasi triwulan 1 dan 2 dari 4 triwulan selama masa satu tahun anggaran seperti yang terlihat pada Tabel 32 berikut.

Tabel 33. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Unggulan Pemerintah Daerah Tri Wulan 1 Dan 2 Tahun 2021

NO	OPD	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH				Keterangan
		TW 1		TW 2		
		K	Rp.	K	Rp.	
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,21	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	Dinas Kesehatan	61,42	12,14	62,53	37,26	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	
3	Dinas Sosial	0,00	0,05	27,70	19,12	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16,13	18,27	56,33	33,02	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35,42	22,27	41,67	32,28	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1,12	11,11	11,91	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	80,00	57,10	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20,00	5,20	50,00	58,07	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,00	3,75	52,63	50,21	

NO	OPD	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH				Keterangan
		TW 1		TW 2		
		K	Rp.	K	Rp.	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	
10	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	11,20	7,38	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4,46	18,75	31,46	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12	Dinas Perikanan	17,75	1,64	43,33	12,96	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
13	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian	8,87	3,19	22,66	14,89	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
14	Dinas Perkebunan	0,00	1,41	0,00	6,25	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	50,00	27,86	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	22,06	0,00	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	27,27	0,03	45,45	0,09	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18	Sekretariat Daerah (Bag. Kerjasama & Bag. Umum)	0,00	5,38	0,00	20,82	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19	Kecamatan Bengkalis	22,56	32,75	22,56	32,75	

NO	OPD	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH				Keterangan
		TW 1		TW 2		
		K	Rp.	K	Rp.	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20	Kecamatan Bukit Batu	12,50	1,98	62,50	22,93	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	
21	Kecamatan Mandau	0,00	0,00	4,17	0,72	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
22	Kecamatan Bantan	1,10	1,10	1,96	2,04	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
23	Kecamatan Pinggir	0,00	0,32	0,00	3,40	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
24	Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	4,17	3,50	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
25	Kecamatan Rupat	0,00	0,00	0,00	0,34	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
26	Kecamatan Rupat Utara	0,00	0,00	3,49	2,11	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
27	Kecamatan Bandar Laksamana	6,67	13,78	20,00	31,71	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
28	Kecamatan Bathin Solapan	0,00	2,16	33,33	50,79	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
29	Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	40,28	32,59	

NO	OPD	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH				Keterangan
		TW 1		TW 2		
		K	Rp.	K	Rp.	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	EVALUASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BENGKALIS	7,99	4,52	27,17	20,82	
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

5.2 PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKALIS

5.2.1 Umum

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bengkulu mengacu pada Rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Bengkulu tahun 2007-2027, yang memang sampai saat ini belum di perdakan namun dalam dokumen yang sudah disusun ini pengembangan pariwisata Bengkulu sudah dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis ditingkat global, nasional maupun lokal yang didukung oleh berbagai potensi yang ada sebagai unsur penunjang sektor kepariwisataan.

Untuk lama kunjungan wisata di Kabupaten Bengkulu dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu selama 3 hari. Lama kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya uang yang dihabiskan wisatawan selama berada di Kabupaten Bengkulu. Semakin lama wisatawan tinggal maka semakin banyak kontribusi sector wisata terhadap PAD daerah. Untuk tahun 2019 kontribusi PAD dari sektor pariwisata adalah sebesar 50 juta rupiah, jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 16.000.000. Kontribusi ini disinyalir lebih sedikit dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banyak pengeluaran wisatawan yang tidak dapat dideteksi karena pengeluaran wisatawan cenderung menysar langsung pada masyarakat dan sulit dihitung angka pastinya.

Tabel 1. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkulu 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Lama kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
PAD sektor pariwisata	na	na	na	50.000.000	16.000.000

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu, 2021

5.2.2 Kondisi Eksisting

Berikut kondisi daya tarik wisata dan sumberdaya serta lokasi wisata Kabupaten Bengkulu:

1). Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu yang merupakan suaka margasatwa yang terletak di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2009, dimana terdapat area inti seluas 178.222 ha yang meliputi dua suaka margasatwa dan hutan konservasi yang diperuntukkan sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pemantauan ekosistem serta area penyangga seluas 222.246 ha yang difungsikan sebagai pendukung konservasi.



Sumber : kompasiana.com

2). Mangrove Tanjung Leban

Mangrove Tanjung Leban yang terletak di Jalan Lintas Dumai-Sungai Pakning, Dusun Bakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana sudah memiliki beberapa fasilitas seperti track di dalam hutan dan dermaga yang terbuat dari kayu sehingga pesona hutan mangrove dapat dinikmati para pengunjung dan sebagai penumbuhkembangan edukasi pelestarian pengelolaan hutan mangrove

Gambar 13. Mangrove Tanjung Leban



Sumber : riaukepri.com

3). Pantai Sepahat

Gambar 14. Pantai Sepahat



Sumber : antaranews.com

suasana panorama pantai yang indah sambil berekreasi.

Pantai Sepahat yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Dusun Murni Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana persisnya di jalan lintas Dumai-Pakning serta dapat diakses baik melalui transportasi darat maupun laut yang sudah memiliki fasilitas area parkir yang luas serta infrastruktur jalan yang sudah memadai sehingga pengunjung dapat menikmati daya tarik pesona

4). Pantai Wisata Bahari

Pantai Wisata Bahari terletak di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka serta mempunyai daya Tarik tersendiri bagi pengunjung karena disekitar pesisir

Gambar 15. Pantai Wisata Bahari



Sumber : xnewsscom

pantai banyak rumah nelayan juga sebagai tempat pengelolaan hasil tangkapan ikan dilaut bagi masyarakat nelayan.

5). Wisata Tanah Gambut Arboretum

Wisata Tanah Gambut Arboretum terletak di Kel. Sungai Pakning Kec. Bukit Batu juga menjadi salah satu objek wisata edukasi yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya arti alam khususnya lahan gambut dan secara tidak langsung juga menyadarkan masyarakat akan dampak kebakaran hutan yang selama ini terjadi di Kawasan gambut.

Gambar 16. Wisata Tanah Gambut Arboretum



Sumber : xnewsscom

6). Pantai Tanjung Lapin

Gambar 17. Pantai Tanjung Lapin



Sumber : xnewsscom

Pantai Tanjung Lapin dengan Panjang garis pantai sepanjang 17 Km yang terletak di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara ini merupakan salah satu objek wisata unggulan pemerintah Kabupaten Bengkalis karena pantai yang berpasir putih serta landai yang didukung

dengan kondisi air laut yang biru serta setiap tahunnya diadakan kegiatan pesta pantai yang disertai perlombaan perahu jong, gasing, dan layang-layang serta mandi shafar.

Adapun beberapa fasilitas pendukung sudah tersedia berupa 2 unit wisma, fasilitas toilet, gazebo serta warung makan dan fasilitas parkir sehingga daya Tarik wisata dapat dinikmati oleh pengunjung pantai ini apalagi panorama pantai yang indah ini akses infrastrukturnya sudah memadai.

7). Pulau Beting Aceh

Gambar 18. Pulau Beting Aceh

Pulau Beting Aceh merupakan pulau pasir kecil luas 2 ha yang memiliki daya utama hamparan indah pasir mempunyai fenomena unik apabila di injak atau disentuh tangan akan mengeluarkan berderik atau di sebut masyarakat tempatan dengan pasir bebisisk serta deretan cemara laut ditengah pulau.



Sumber : bengkaliskab.go.id

dengan tarik putih dan dimana dengan suara sebutan pohon

8). Pantai Tanjung Punak

Gambar 19. Pantai Tanjung Punak

Pantai Tanjung berlokasi di Desa Kec. Rupat Utara mempunyai potensi dengan hamparan serta hutan garis pantai yang serta merupakan



Punak yang Tanjung Punak juga wisata bahari pasir putihnya mangrove di masih lestari lokasi event

tahunan ritual Mandi Safar pada hari Rabu akhir bulan Safar.

9). Pantai Pesona

Pantai Pesona yang berlokasi di Kecamatan Rupal Utara dengan garis pantai 17 km yang memiliki hamparan pasir putih juga memiliki panorama pantai nan elok sehingga memberikan daya Tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara datang berkunjung pada objek wisata ini.

Gambar 20. Pantai Perapat Tunggal

10). Pantai Perapat Tunggal

Pantai Perapat Tunggal merupakan salah satu objek wisata pantai yang berlokasi di Desa Perapat Tunggal Kec. Bengkalis yang sudah dilengkapi sarana dan prasarana taman bermain serta fasilitas pendukung lainnya tentu menjadi nilai lebih jika wisatawan berkunjung kesini.



Sumber : riaumagz.com

11). Pantai Indah Selat Baru

Gambar 21. Pantai Indah Selat Baru



Sumber : riaumagz.com

Pantai Indah Selat Baru merupakan salah satu objek wisata pantai yang berlokasi di Desa Selat Baru Kec. Bantan yang sudah dilengkapi sarana dan prasarana taman bermain serta fasilitas pendukung lainnya tentu menjadi nilai lebih jika wisatawan berkunjung kesini.

12). Pantai Ketapang

Pantai Ketapang yang terletak di Desa Sungai Cingam Kec. Rupal dengan panorama pantai berpasir putih sudah memiliki fasilitas pendukung objek wisata yang memadai menjadi destinasi wisata bagi pengunjung untuk menikmati keindahan suasana panorama pantai.

Gambar 22. Pantai Ketapang



Sumber : bengkaliskab.go.id

13). Kampung Zapin

Kampung Zapin merupakan kampung yang melestarikan tarian tradisional Zapin yang terletak di Desa Meskom Kec. Bengkalis dan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Propinsi Riau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu di masyarakat dikampung Zapin ini juga



melestarikan alat musik Gambus dimana semua aktivitas tersebut dilakukan pada sanggar seni yang disebut dengan Sanggar menjulan Budaya . Bangunan Sanggar seni ini didirikan sejak tahun 1993 oleh Pemerintah Kab. Bengkalis.

Gambar 23. Kampung Zapin

Sumber : meskom.desa.id

5.3 PENGEMBANGAN KECAMATAN BENGKALIS DAN BANTAN SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN PERIKANAN

5.3.1 Umum

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera, Kabupaten Bengkalis fokus menjadikan Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Disamping menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan Budaya Melayu Serumpun.

Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan mendirikan SD unggulan, SMP Unggulan dan SMA unggulan (*boarding school*) yang bekerja sama dengan SMA Taruna Nusantara Magelang. Pendidikan berbasis vokasi seperti SMK diperbanyak diantaranya SMK Pelayaran, SMK Penerbangan, SMK Pertanian dan SMK Pariwisata.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berhak ikut dalam pelaksanaan program pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bukan hanya membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif, tetapi sangat mengharapkan agar dapat ikut menanamkan modalnya dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini, khususnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi (Perguruan tinggi).

5.3.2 Kondisi Existing

Sejak tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun (mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas).

Memasuki tahun 2015 telah berdiri 8 perguruan tinggi, yang mana 5 diantaranya perguruan tinggi negeri di Bengkalis yaitu :

1. Politeknik Negeri Bengkalis (satu-satunya Politeknik Negeri di Riau);
2. Politeknik Maritim Negeri Bengkalis (satu-satunya Politeknik Kemaritiman di Sumatera);
3. Akademi Komunitas Negeri Bengkalis;
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
5. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis (Swasta)
7. AMIK MITRAGAMA Duri;
8. STAI Hubbul Wathan Duri.

5.3.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai peraturan perundang-undangan, untuk pengembangan Kota Bengkalis sebagai pusat pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor, berupa :

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Penyediaan pemberian perizinan.

5.4 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BENGKALIS

5.4.1 Umum

Perkembangan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis menuntut adanya perbaikan dan penyediaan sarana prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih. Permintaan air bersih yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten.

PDAM Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya jasa penyedia layanan air bersih yang dilakukan PDAM Kabupaten Bengkalis.

- Tersedianya dua sungai besar sebagai sumber air baku dengan debit air yang sangat besar, yaitu Sungai Rangau dan Sekapas;
- Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau masing-masing terdiri dari 11 desa/kelurahan, 13 desa/kelurahan, 10 desa/kelurahan dan 9 desa/kelurahan, sementara pelayanan PDAM Kabupaten Bengkalis Cabang Duri baru terakses untuk 10 desa/kelurahan atau 35,71 persen;
- Penduduk Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau, masing-masing 46.643 jiwa, 196.284 jiwa, 46.818 jiwa dan 41.159 jiwa, sedangkan yang baru terlayani 8.501 KK atau 11,28 persen;
- Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kabupaten Bengkalis Cabang Duri saat ini memiliki kapasitas terpasang 40liter/detik (IPA 1) dan telah ditambah dengan dibangunnya IPA Plat Baja dengan kapasitas terpasang 100 liter/detik (IPA 2);

- Volume reservoir sebesar 4.850 m³ dan jumlah pelanggan aktif pada April 2013 tercatat sebanyak 8.501 sambungan rumah (SR);
- Jangkauan pipa PDAM Kabupaten Bengkalis Cabang Duri sepanjang 99.046 m;
- Sumber air waduk 125 PT. Chevron;
- Pengelolaan dan pendistribusian air bersih oleh PDAM Kabupaten Bengkalis Cabang Duri ke pelanggan sudah dilaksanakan selama 24 jam.

5.4.2 Kondisi Existing

Tabel 34. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2018.

No.	Kecamatan	Pelanggan	Air disalurkan	Nilai
1.	Mandau	7.259	1.283.558	6.866.133.000
2.	Pinggir	-	-	-
3.	Bathin Solapan	-	-	-
4.	Talang Muandau	-	-	-
5.	Bukit Batu	1.398	210.023	1.038.535.000
6.	Siak Kecil	483	95.576	468.232.000
7.	Bandar Laksamana	-	-	-
8.	Rupat	350	29.857	185.527.000
9.	Rupat Utara	-	-	-
10.	Bengkalis	3.778	1.052.190	5.420.862.000
11.	Bantan	-	-	-
TOTAL		13.268	2.671.204	13.979.289.000

Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2019)

Tabel 35. Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Bengkalis, 2014-2018

Jenis Konsumen	2014	2015	2016	2017	2018
Sosial :					
Umum	146	149	141	144	139
Khusus	94	94	90	87	86
Non Niaga:					
Rumah Tangga (R1)	4.300	5.590	4.986	2.990	2.769
Rumah Tangga (R2)	6.609	6.454	6.307	7.926	7.979
Rumah Tangga (R3)	263	258	258	564	601
Industri dan Niaga Khusus:	1.748	1.697	1.639	1.698	1.696
Pelabuhan:	4	4	2	2	2
Lainnya:	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL :	13.164	14.246	13.423	13.411	13.272

Sumber : Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2019)

Tabel 36. Banyaknya Air Minum yang Disalurkan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Bengkulu, 2014-2018 (m3)

Jenis Konsumen	2014	2015	2016	2017	2018
Sosial :					
Umum	53.890	52.763	42.995	40.260	37.972
Khusus	39.412	34.338	38.384	62.940	35.625
Non Niaga:					
Rumah Tangga (R1)	800.716	862.643	901.314	737.796	407.685
Rumah Tangga (R2)	1.436.783	1.389.659	1.252.282	1.257.648	1.514.813
Rumah Tangga (R3)	104.600	113.663	106.459	160.167	265.165
Industri dan Niaga Khusus:	377.720	373.128	342.882	374.155	406.085
Pelabuhan:	7.215	8.497	8.229	6.873	2832
Lainnya:	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL :	2.820.336	2.834.691	2.693.545	2.639.839	2.671.204

Sumber : Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2019)

5.5.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai peraturan perundang-undangan, dalam pengembangan pengolahan air bersih di Kecamatan Mandau, Rupat dan Siak Kecil ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor, berupa :

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Percepatan pemberian izin.

5.5 PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK DI KABUPATEN BENGKALIS

5.5.1 Umum

Selain memiliki jumlah dan pertumbuhan penduduk terbesar di Kabupaten Bengkalis, pembangunan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau di jadikan sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026. Kondisi tersebut jelas membutuhkan ketersediaan energi listrik yang sangat besar. Penggunaan listrik di Kabupaten Bengkalis sudah merata. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai penerangan utama sudah melebihi 90 persen.

5.5.2 Kondisi Existing

Tabel 37. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Bengkalis, 2014-2017

Tahun	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah Total
2014	86,12	12.14	1.73	100.00
2015	84.95	12.03	3.02	100.00
2016	88.92	7.99	3.09	100.00
2017	94.00	3.71	2.29	100.00

Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2019)

5.5.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan selalu mendukung dan berkoordinasi dengan pihak PT.PLN terkait pengembangan dan optimalisasi layanan elektrifikasi di wilayah Pemerintah Kabupaten bengkalis, walau pun kewenangan daerah tingkat kabupaten/kota telah menjadi kewenangan propinsi.

5.6 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN BENGKALIS

5.6.1 Umum

Untuk menjawab tantangan perubahan iklim global dan degradasi lingkungan yang mempengaruhi produktivitas ikan, Hatchery Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis telah berhasil berinovasi menghasilkan ikan nila salin yang toleran terhadap salinitas atau tingkat keasinan air lebih dari 20 ppt (perairan payau).

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan ikan konsumsi paling populer dan layak dikembangkan sebagai sumber protein masyarakat. Namun lahan budidaya di perairan air tawar cenderung menyempit akibat desakan pemanfaatan lahan untuk industri dan pemukiman. Sementara itu, sekitar 90-95% dari total lahan bekas tambak udang di Kabupaten Bengkalis dalam kondisi terlantar dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Untuk memanfaatkan lahan-lahan bekas tambak udang tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mencoba melakukan inovasi teknologi terhadap ikan nila salin, yaitu melakukan pembenihan ikan nila di Hatchery Kecamatan Bantan dan menguji coba pembesaran di Demplot Penebal Kecamatan Bengkalis dan hasilnya cukup memuaskan, baik dari sisi pertumbuhan ikan maupun keuntungan bagi bisnis usaha budidaya perikanan.

Keunggulan nila salin selain kuat menghadapi salinitas tinggi, yaitu salinitas air di atas 20 ppt, nila salin juga mempunyai tingkat pertumbuhan yang cepat. Jika menebar bibit berukuran 5-10 cm, untuk mencapai bobot 250 gram memerlukan waktu 3-4 bulan atau jika ingin bobot per ekornya 600 gram, hanya memerlukan waktu 6-7 bulan. Budidaya ikan nila salin menjadi salah satu alternatif terbaik dalam mengatasi kelesuan budidaya ikan air payau dewasa ini.

5.6.2 Kondisi Existing

Secara umum Kabupaten Bengkalis mempunyai potensi budidaya tambak seluas 1.358,53 ha dan yang baru termanfaatkan seluas 15,10 ha. Dengan kondisi usaha budidaya udang dewasa ini yang kurang menguntungkan bagi petambak ekonomi lemah, sehingga banyak petambak yang sementara waktu meninggalkan lahan usahanya untuk tidak dioperasionalkan.

Dan pada akhirnya lahan-lahan yang berpotensi untuk kegiatan budidaya perikanan tidak dimanfaatkan/terlantar. Hal tersebut karena tingginya biaya operasional berkaitan dengan naiknya harga bahan minyak serta kebutuhan pakan udang, sehingga perlu terobosan baru melalui perubahan jenis/komoditas usaha budidaya yang masih dapat memberikan keuntungan. Salah satu usaha yang sangat menjanjikan adalah budidaya ikan jenis nila salin.

5.6.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai peraturan perundang-undangan, untuk pengembangan budidaya ikan nila salin di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupert, Rupert Utara, Bukit

Batu dan Siak Kecil, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor berupa:

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Percepatan pemberian perizinan;
- Memberikan jaminan keamanan investasi.

5.7 PENGEMBANGAN INDUSTRI NENAS DI KABUPATEN BENGKALIS

5.7.1 Umum

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Salah satu hasil pertanian daerah ini adalah nenas (*Ananas comusus. L*) yang tersedia sepanjang tahun karena tidak dipengaruhi musim hujan maupun musim kemarau. Budidaya nenas banyak dilakukan masyarakat di Kecamatan Bantan, Bengkalis dan Bukit Batu.

Untuk meningkatkan nilai ekonomis nenas dan pendapatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya pengembangan industri pengolahan nenas. Namun hal ini baru dilakukan sebatas untuk kelompok-kelompok industri rumah tangga. Adapun produk olahan nenas yang dihasilkan diantaranya dodol nenas dan selai nenas yang menjadi salah satu makanan khas Bengkalis yang pemasarannya tidak hanya dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, tetapi juga ke daerah lain.

5.7.2 Kondisi Existing

Hasil panen tanaman nenas di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan data dari BPS (Kabupaten Bengkalis Dalam Angka Tahun 2019) , terjadi peningkatan hasil produksi dimana sebanyak 6,898 Ton tahun 2016, meningkat di tahun 2017 sebanyak 23,535 Ton seterusnya mengalami peningkatan lagi ditahun 2018 sebanyak 91,141 ton.

Industri untuk produk olahan nenas dalam meningkatkan nilai tambah telah dilakukan baru sebatas industri olahan rumah tangga seperti dodol dan keripik nenas, untuk industri pengolahan nenas kaleng, belum ada. Padahal pemasaran untuk berbagai produk olahan nenas yang lain masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk skala usaha menengah.

5.7.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis pengembangan industri pengolahan nenas ini adalah memberikan berbagai kemudahan kepada para investor dalam bentuk:

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Percepatan pemberian perizinan.

5.8 PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET DI KABUPATEN BENGKALIS

5.8.1 Umum

Luas area tanaman perkebunan karet yang dihimpun Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018 yaitu karet 30.385 ha. Kabupaten Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi, terutama dari sektor perkebunan. Salah satu komoditi sektor perkebunan yang cukup besar dihasilkan adalah karet.

5.8.2 Kondisi Existing

- Berdasarkan data tahun BPS (Kabupaten Bengkulu Dalam Angka Tahun 2019), luas area tanaman karet di daerah ini, baik itu yang berasal dari perkebunan rakyat maupun perusahaan perkebunan sebanyak 30.385 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan produksi 44.953,44 ton. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan industri hilir karet.
- Meskipun produksi karet di Kabupaten Bengkulu besar, namun saat ini pengembangan industri hilir karet dalam menopang perkembangan agroindustri belum ada. Produk yang dihasilkan hanya sebatas getah alam (*natural rubber*), sehingga nilai tambah yang didapat dari hasil perkebunan ini belum optimal.

Tabel 38. Luas Areal Produksi Tanaman Karet per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Areal Tanaman		Produksi Tanaman	
		Ha	%	Ton	%
1.	Mandau	2.006	6,60	8.829	19,64
2.	Pinggir	1.430	4,72	840	1,87
3.	Bathin Solapan	-	-	-	-
4.	Talang Muandau	-	-	-	-
5.	Bukit Batu	4.471	14,71	2.310	5,14
6.	Siak Kecil	1.257	4,12	1.329	2,96
7.	Bandar Laksamana	-	-	-	-
8.	Rupat	5.110	16,82	9.830	21,87
9.	Rupat Utara	3.808	12,53	7.093	15,78
10.	Bengkalis	5.065	16,67	5.416	12,05
11.	Bantan	7.236	23,81	9.305	20,70
Jumlah		30.385,0	100,00	44.953	100,00

Sumber : Bengkulu Dalam Angka (BPS Bengkulu, 2019)

5.8.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk pembangunan pengembangan industri

pengolahan karet ini adalah memberikan berbagai kemudahan kepada para investor dalam bentuk:

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Percepatan pemberian perizinan.

5.9 PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BENGKALIS

5.9.1 Umum

Dalam hal potensi sumber daya alam, Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai macam komoditas yang berlimpah dengan nilai ekonomis yang tinggi, terutama yang berasal dari sektor perkebunan. Salah satu komoditas dimaksud antara lain kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Bengkalis Dalam Angka Tahun 2019), luas areal tanaman kelapa sawit tahun 2018 sebesar 148.117 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan produksi tanaman 1.215.436.09 ton.

5.9.2 Kondisi Existing

- a. Potensi lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis sebanyak 22.531 ha yang tersebar di desa-desa di 6 kecamatan, yaitu:
 1. Mandau : 51.682 Ha
 2. Pinggir : 65.073 Ha
 3. Bukit Batu : 7.281 Ha
 4. Siak Kecil : 2.006,5 Ha
 5. Rumat : 5.106 Ha
 6. Rumat Utara : 3.808 Ha
- b. Rata-rata satuan biaya pembangunan kebun sawit sebagaimana Standar Satuan Biaya Pembangunan Kebun Program Revitalisasi Perkebunan sesuai SK Direktur Jenderal Perkebunan No. 135/Kpts/RC.110/10/2008 sebesar Rp. 37.711.000/Ha.
- c. Saat ini ada 6 perusahaan besar yang akan membuka perkebunan kelapa sawit di Bukit Batu, Bengkalis, Rumat dan Siak Kecil dengan luas areal sekitar 35.818,60 Ha.

5.9.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai peraturan perundangan-undangan, untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor, berupa:

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Percepatan pemberian perizinan.

5.10 PENGEMBANGAN BUDIDAYA UDANG VANNAMEI DI KABUPATEN BENGKALIS

5.10.1 Umum

Udang Vannamei (*Litopenaues vannamei*) di Indonesia merupakan jenis udang introduksi dari kawasan sub-tropis sekitar perairan Negara Meksiko, Amerika Latin. Meskipun asal udang vannamei dari kawasan sub-tropis, dalam pengembangannya dapat pula dibudidayakan di kawasan tropis secara missal dengan penerapan teknologi dari sederhana hingga isentif.

Bila dibandingkan dengan jenis udang lainnya, udang vannamei memiliki karakteristik spesifik seperti adaptasi tinggi terhadap lingkungan suhu rendah, perubahan salinitas (khususnya pada salinitas tinggi), laju pertumbuhan yang relatif cepat pada bulan I dan II dan kelangsungan hidup tinggi. Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, jenis udang ini sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan di wilayah Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Bengkalis.

5.10.2 Kondisi Existing

Secara umum Kabupaten Bengkalis mempunyai potensi budidaya tambak seluas 1.300 Ha dan yang baru termanfaatkan seluas 100 Ha. Dengan kondisi minat usaha dari masyarakat yang terus berkembang sehingga secara selaras juga mengalami peningkatan angka produksi hasil tambak budidaya udang vannamei di Kabupaten Bengkalis.

Dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya udang Vannamei memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi masyarakat usaha tambak udang di Kabupaten Bengkalis.

5.10.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai peraturan perundang-undangan, dalam pengembangan budidaya ikan air payau di Kecamatan Bengkalis dan Bantan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memberikan berbagai kemudahan kepada investor, berupa:

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Percepatan pemberian perizinan;
- Memberikan jaminan keamanan investasi.

5.11 PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LELE DI KABUPATEN BENGKALIS

5.11.1 Umum

Selain memiliki perairan laut yang sangat luas, Kabupaten Bengkalis juga dialiri banyak sungai dan memiliki sejumlah tasik (danau). Hal ini sangat cocok dan potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, baik ikan air tawar, payau maupun laut.

Dinas Kelautan dan Perikanan telah membagi dua zona pembangunan budidaya sektor perikanan dan kelautan di daerah ini, khususnya untuk

budidaya perikanan. Untuk budidaya perikanan air tawar, fokus pengembangannya di Bukit Batu, Mandau, Pinggir dan Siak Kecil.

Sedangkan budidaya ikan air payau dan laut di arahkan ke Kecamatan Bantan, Bengkalis, Rupa dan Rupa Utara. Jenis ikan air tawar yang potensi dikembangkan melalui budidaya di Kabupaten Bengkalis, antara lain ikan Nila, Lele, Gurami, Patin dan Mas. Namun, jenis ikan yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ikan Lele, karena memiliki pemasaran yang cukup menjanjikan. Selain itu, di Kabupaten Bengkalis telah ada usaha pengolahan ikan Lele, yaitu usaha pengasapan di Kecamatan Mandau.

5.11.2 Kondisi Eksisting

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi budidaya air tawar (kolam) seluas 931,9 Ha dan yang baru dimanfaatkan seluas 202,07 Ha, dengan daerah pengembangan di Kecamatan Bukit Batu, Mandau, Pinggir dan Siak Kecil.

5.11.3 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Sesuai peraturan perundangan-undangan, dalam pengembangan budidaya ikan lele di Kecamatan Bukit Batu, Mandau, Pinggir dan Siak Kecil ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor, berupa:

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- Penyediaan lahan atau lokasi;
- Percepatan pemberian perizinan;
- Memberikan jaminan keamanan investasi.



BAB VI PENUTUP



Demikianlah Buku Profil Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 ini disusun sebagai sumber informasi secara umum bagi semua pihak terkait kondisi existing dari berbagai sektor yang ada, serta kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengelola segala aspek sumber daya yang dimiliki.

Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”***.